

Menangani kilat¹

Uraian historis tentang ketersediaan senjata api kecil dan pengendalian senjata api di Timor Leste

Enam tahun setelah kemerdekaan dan dua tahun setelah 'krize',² pengaruh senjata api kecil di Timor Leste belum dibahas secara teliti. Senjata api tersebut menjalankan peranan krusial dalam mempengaruhi taktik penindasan oleh mantan penguasa penjajahan serta tindakan balasan oleh gerakan perlawanan, dan juga mempengaruhi kekerasan pidana yang dilakukan baru-baru ini. Sekarang ini, dengan adanya lembaga-lembaga yang lemah, ketegangan yang belum reda, serta peraturan perundang-undangan dan norma-norma pengendalian senjata api yang tidak ditegakkan dengan baik, ternyata bahwa senjata api militer dan senjata api yang biasanya digunakan oleh orang sipil masih memicu kekerasan antarpribadi dan kekerasan kolektif. Persoalan tentang senjata api kecil yang hilang dari persediaan negara dilaporkan setiap minggu oleh media selama enam bulan terakhir.³ Cerita-cerita yang berhubungan dengan pembagian senjata api kepada orang sipil juga kontraporsial.⁴

Timor Leste lambat-laun dimilitarisasi sebagai akibat dari kejadian baru-baru ini. Tidak begitu banyak senjata api masuk ke dalam Timor Leste selama periode penjajahan Portugal, yang sangat berbeda dengan pemberian senjata api kepada masyarakat Timor Leste secara berangsur-angsur selama tahun 1970-an, yang terus sampai 1999. Walaupun jumlah senjata api kecil dan ringan di Timor Leste cukup rendah, ada lebih banyak senjata gaya militer yang canggih selama periode pendudukan Indonesia (1975-99), dan gerakan perlawanan Timor Leste hanya memiliki sejumlah kecil senjata api, meskipun begitu jumlah yang dimilikinya masih signifikan.⁵

Dalam melacak kronologi senjata api yang tersedia di Timor Leste, Laporan Singkat ini menemukan bahwa ketersediaan dan motivasi-motivasi yang berhubungan dengan perolehan senjata api dan penggunaannya berevolusi dari waktu ke waktu. Selama masing-masing periode penjajahan oleh Portugal dan Indonesia, senjata api pada utamanya digunakan sebagai alat penindasan oleh pasukan penjajah, sedangkan kelompok bersenjata menggunakannya untuk melanjutkan perlawanan dan pemberontakan. Selama dasawarsa ini, senjata api memungkinkan dan mempertajam kekerasan komunal, pada

khususnya pada 1999 dan 2006. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa Timor Leste kebanjiran senjata api. Walaupun jumlah senjata api yang dimiliki negara dan orang sipil tidak didaftarkan atau dipertanggungjawabkan secara layak, tidak banyak senjata api diproduksi di Timor Leste; namun, senjata buatan sendiri masih menimbulkan tantangan yang nyata. Walaupun demikian, sebagaimana dilihat dengan jelas selama krisis 2006, senjata api dalam jumlah terbatas masih dapat menimbulkan dampak yang luar biasa. Secara khusus, Laporan Singkat ini menemukan yang berikut:

- Keberadaan senjata api atau masuknya senjata api dengan pesat ke dalam masyarakat Timor Leste memicu kekerasan secara berkala, tetapi pada skala luas.
- Sejak tahun 1970-an, dan pada khususnya selama 1990-an, senjata api dibocorkan dari gudang senjata negara dan senjata api sengaja diberikan kepada orang sipil oleh aparat keamanan yang berarti ada kemungkinan besar bahwa sebagian senjata api tidak pernah akan dikumpulkan kembali.
- Walaupun ketersediaan senjata api kecil dan ringan bukan suatu hal yang baru, militarisasi yang tersebar luas dalam masyarakat sipil adalah fenomena yang cukup baru.
- Penggunaan senjata api kecil telah berubah dari waktu ke waktu – dari penindasan dan pemberontakan sampai pembelaan rumah tangga, penyerangan oleh gerombolan, dan untuk melakukan intimidasi.
- Jarang ada pemasukan senjata api, tetapi gudang senjata yang sudah ada dan pembagian oleh para pembesar merupakan sumber terbesar senjata baru di Timor Leste

Yang cukup signifikan dalam krisis 2006, pemerintah Timor Leste kehilangan kendali atas kebanyakan gudang senjata. Selama ini gudang senjata dan amunisi tidak dikelola atau diamankan dengan baik, dan senjata api dibagi kepada kelompok-kelompok sipil sebelum krisis yang meningkatkan ketegangan dan pada akhirnya mempercepat terjadinya kekerasan yang akut. Hanya sedikit senjata modern dan senjata dari periode penjajahan masih

tersebar antara berbagai macam kelompok sipil (misalnya, gerombolan, kelompok bela diri, dan gerakan veteran). Demikian pula, ada tantangan yang mungkin sulit diatasi berhubungan dengan ketersediaan amunisi dan granat setelah pecahnya kekerasan pada 1999 dan 2006. Pengelolaan atas persediaan yang ada dan pengendalian atas senjata api yang tidak sah merupakan tantangan besar, tetapi upaya tersebut berang kali akan meningkatkan keselamatan dan keamanan secara signifikan.

Meningkatnya penggunaan senjata api: periode penjajahan Portugal (1520-1975)

Para petugas Portugal pada pertamanya memasukkan cukup banyak senjata api kecil dalam Timor Leste selama abad kesembilan belas. Menurut rencana, senjata api tersebut seharusnya digunakan untuk mencegah pemasukan Hindia Belanda dan juga untuk melawan pemberontakan dalam negeri, serta dibagi kepada sekutu lokal. Selama bagian akhir dari abad tersebut, ada peningkatan dalam teknologi baru tentang cara membunuh: senjata api tembak cepat yang diisi dari belakang menimbulkan alat penindasan yang lebih efisien. Tetapi senjata api tersebut juga digunakan untuk melawan orang-orang Portugal sendiri,⁶ termasuk dalam perang Manufahi (1908-12).⁷

Peranan krusial yang dijalankan senjata api kecil untuk mendukung pemberontakan menonjol dalam pemberontakan pada tahun 1959 yang dipimpin oleh gabungan orang Timor Leste dan orang Indonesia yang anti-imperialisme. Pada tahun tersebut, distrik Viqueque di bagian Timur dari Timor Leste menjadi lokasi dimana untuk terakhir kali orang-orang bersenjata melakukan pemberontakan besar terhadap orang-orang Portugal. Pemberontakan ini dimungkinkan oleh sejumlah kecil senjata api yang tidak terkendali. Pada bulan Juni 1959 para pemberontak mengambil 48 senjata api saja dari kantor pemerintah.⁸ Sebelum pecahnya pemberontakan, penyitaan dan pemindahan senjata api dalam jumlah kecil juga menimbulkan suasana tidak aman.⁹ Sebagai reaksi terhadap pencurian ini



Kelompok Major Alfredo Reinado dan Letnan Gastao Salsinha di Maubisee, Timor-Leste © HDC 2008

Portugal mengambil tindakan yang tegas dan berdarah: sekurang-kurangnya 1,000 orang Timor mati dalam tindakan menindas yang segera dilaksanakan pada tahun itu.

Dengan mengakui keperluan untuk memperkuat aparat keamanan domestik di jajahan tersebut, orang-orang Portugal mengimpor senjata api baru. Pada tahun 1975 Portugal telah memasukkan ke Dili sejumlah besar senapan semi-otomatis G3 standar NATO. Portugal sendiri mengalami transformasi politik dengan jatuhnya rezim Salazar dan mulainya pemisahan jajahannya. Ketidakstabilan yang kemudian terjadi di Lisbon memungkinkan munculnya beberapa partai politik yang baru, termasuk FRETILIN, UDT, APODETI, KOTA, dan Tralabhistas.¹⁰ Indonesia mempengaruhi proses dari seberang perbatasan, dan persaingan antara partai politik dalam negeri mulai menimbulkan kekerasan. Pengambilan senjata api dari gudang senjata yang tidak diamankan dengan baik merupakan faktor signifikan dalam memicu perang sipil.

Reaksi berantai yang pada akhirnya menyalakan perang sipil mulai pada tanggal 27 Juli 1975, ketika UDT menyelenggarakan demonstrasi besar yang anti-FRETILIN di pusat Dili. Pada hari berikutnya, untuk menunjukkan kekuatannya, FRETILIN meletakkan lima puluh orang laki-laki di jalan yang membawa senjata senapan G3.¹¹ UDT takut akan disingkirkan oleh FRETILIN sehingga mengakses gudang senjata polisi dan mengambil kendali atas kota pada tanggal 10 Agustus 1975. Pada tanggal 20 Agustus 1975 Lt. Rogerio Lobato, seorang aktivis senior FRETILIN, yang di kemudian hari menjadi menteri pertahanan yang pertama, meyakinkan kebanyakan serdadu permanen asal Timor Leste dalam Tentara Portugal untuk bergabung dengan FRETILIN, dan berhasil mengambil senjata api dari gudang senjata angkatan bersenjata (lihat Tabel 1).¹² Pada tanggal 28 November, ketika FRETILIN mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste, ratusan tahanan politik telah dieksekusi dan

beberapa ribu orang mati, dan banyak orang terpaksa pindah ke Indonesia.¹³

Dari perang sampai konflik tingkat rendah: periode Indonesia (1975–99)

Baik Portugal maupun Timor-Leste berada dalam keadaan kacau, sehingga Indonesia, dengan dukungan diam-diam dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, mengambil alih Dili pada tanggal 7 Desember 1975.¹⁴ Rezim yang kemudian dibentuk dan perlawanan dalam negeri terhadapnya menimbulkan perang berskala besar dimana kekerasan bersenjata menjadi lazim dalam kehidupan orang-orang Timor Leste. Konflik ini terdiri atas beberapa tahap yang jelas, yang masing-masing dipengaruhi oleh penyediaan senjata api.

Selama tahap awal, ketika Dili jatuh secepatnya ke tangan orang-orang Indonesia, sayap bersenjata FRETILIN, *Forças Armadas de Libertacao Nacional de Timor-Leste* (FALINTIL) memberi perlawanan yang berkelanjutan terhadap Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).¹⁵ Dukungan populer dan penyediaan senapan G3 dan senapan Mauder buatan Portugal dalam jumlah banyak mendukung perlawanan, dan kedua belah pihak mengalami banyak kerugian (lihat Tabel 1).¹⁶ Indonesia mempunyai jauh lebih banyak sumber daya manusia dan material dan lambat-lambat memaksa FALINTIL masuk pedalaman negara. Penggunaan artileri dan pesawat tempur sangat efektif untuk mengurangi kekuatan FALINTIL. Antara 1977 dan 1980 banyak anggota FALINTIL (dan pendukungnya) menyerahkan diri, dan membawa senjata apinya.¹⁷

Setelah mengalami kerugian berat, FALINTIL memasuki periode mengkonsolidasi dan menyusun kembali struktur internal. Pada tahun 1981 Xanana Gusmão dipilih untuk memimpin tahap baru dimana organisasi

tersebut melakukan taktik gerilya. Gusmão mengakui bahwa FALINTIL sangat memerlukan senjata api yang baru, dan dia menyatakan bahwa mereka hanya memiliki kurang dari 10 persen senjata api dari periode pra-invasi.¹⁸ FALINTIL melakukan operasi berpindah-pindah yang dimaksudkan untuk mengganggu (tetapi tidak melakukan kontak substansial dengan) ABRI. Operasi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa perlawanan masih berlanjut, tetapi yang sangat penting, memberi kesempatan untuk menyita senjata api dan amunisi Indonesia.¹⁹ Operasi FALINTIL ditandai oleh penyerangan semacam ini sampai 1999; dan hanya skala dan frekuensinya²⁰ berubah dari waktu ke waktu.²¹ Yang krusial, selain daripada persediaan senjata api yang sudah ada dari periode penjajahan Portugal, serta penyerangan atas (atau pembelian tidak sah²²) persediaan Indonesia,²³ FALINTIL tidak mampu memperoleh senjata api baru dari luar negeri.

Peningkatan penyerangan yang dilakukan sembarang saja pada orang sipil Timor Leste oleh pasukan Indonesia menandai titik balik. Misalnya, pembunuhan massal yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia pada tahun 1991 terhadap 271 orang yang sedang berduka dan mengikuti arak-arakan menuju kuburan Santa Cruz di pusat Dili direkam dan disiarkan ke seluruh dunia. Penangkapan dan penahanan Gusmão pada 1992 menyebabkan penurunan drastis konfrontasi militer dan memulai perjuangan politik agar diakui keabsahannya.

Pada 1999 Presiden Indonesia Habibie mengusulkan bahwa masyarakat Timor Leste dapat menentukan masa depannya melalui jajak pendapat untuk memilih otonomi di bawah kekuasaan Indonesia atau kemerdekaan. Tetapi keberhasilan yang diperoleh selama perjuangan politik kemudian tersingkir oleh kekerasan yang berdarah. Selama jajak pendapat pada bulan Agustus tahun 1999, dimana lebih dari tiga per empat penduduk Timor Leste memilih kemerdekaan, kira-kira 1,500 orang mati, ratusan ribu orang disingkirkan, dan cukup banyak harta benda dihancurkan. Pendistribusian senjata api kecil kepada milisi sipil pro-otonomi oleh pasukan bersenjata Indonesia (Tentara Nasional Indonesia—TNI), dan tindakan yang dilakukan langsung oleh pasukan keamanan Indonesia adalah penyebab utama pertumpahan darah.²⁴ Bahkan setelah TNI keluar dari Timor-Leste pada bulan Oktober 1999, kebanyakan milisi pro-otonomi pindah ke daerah-daerah perbatasan yang memisahkan Indonesia dari Timor-Leste dan mulai membagi senjata api baru. Upaya setengah-setengah dari pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan senjata tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Hanya sedikit sekali kejahatan yang menyangkut senjata pernah diadili.

Pendistribusian senjata kepada kaki-tangan pasukan milisi bukan sesuatu yang baru. Misalnya, ABRI/TNI mempersenjatai, mendanai dan membekali milisi-milisi pro-Indonesia sejak 1975 dalam upaya untuk

menteror dan menaklukkan penduduk sipil.²⁵ Penggunaan milisi juga merupakan cara untuk menjauhkan TNI dari kesalahan. Misalnya, laporan akhir pada bulan Maret 2008 dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan, Indonesia-Timor-Leste (KKP) menyimpulkan bahwa ‘ada bukti kredibel ... yang menunjukkan bahwa TNI memberi senjata kepada milisi dan pemimpin pro-otonomi dan kemudian mengambilnya kembali sesuai dengan keinginannya.’²⁶ Walaupun demikian, KKP mencatat bahwa persediaan senjata api secara berkelanjutan adalah sangat penting bagi operasi milisi dan mereka memperoleh senjata dari banyak sumber.²⁷ Dalam kesaksiannya kepada KKP, Wiranto, yang berpangkat jenderal dalam TNI, mengacu pada ‘[milisi bersenjata] yang terdiri dari kira-kira 1,100 orang ... yang mempunyai 546 senjata yang berbagai macam.’²⁸ Walaupun tidak pernah dilakukan upaya komprehensif untuk mendaftarkan senjata dan amunisi yang dibagi kepada milisi-milisi pada tahun 1999 oleh TNI dan Polisi Nasional Indonesia (POLRI), petugas penghubung militer (MLO) dari Misi

Bantuan Perserikataan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNAMET), yang berwenang untuk menyelenggarakan jajak pendapat pada tahun 1999, menyatakan bahwa senjata yang diserahkan secara publik pada saat itu hanya merupakan sebagian kecil dari senjata yang berada di tangan milisi (lihat Tabel 1).²⁹

Penguasaan dan pengendalian atas senjata yang diberikan oleh TNI kepada milisi juga lemah. TNI sering gagal untuk mendapatkan kembali senjata yang dibagi olehnya, walaupun milisi diperintahkan untuk menyerahkan senjata tersebut, perintah tersebut seringkali diabaikan begitu saja. Amunisi yang diberikan juga tidak dikendalikan dengan baik. Pasukan khusus Indonesia juga bertanggungjawab pada saat ini atas peningkatan senjata api buatan sendiri – yang disebut *rakitan*—untuk melakukan teror dalam masyarakat sambil mengurangi resiko bahwa senjata modern akan jatuh ke tangan orang yang tidak cocok.³⁰ Sebuah *rakitan* yang disertai persediaan amunisi seringkali menjadi instrumen intimidasi yang seefektif senapan serbu modern. Persoalan *rakitan* belum diselesaikan sampai sekarang (lihat Kotak 1).

Periode Perserikataan Bangsa-Bangsa: membangun sektor keamanan

Antara November 1999 dan Mei 2002 Timor Leste dikelola oleh Administrasi Transisi Perserikataan Bangsa-Bangsa di Timor Leste (UNTAET). Namun, menyusul restorasi kemerdekaan pada pertengahan 2002, misi pengganti UNTAET, yaitu Misi Perserikataan Bangsa-Bangsa untuk Mendukung Timor Leste (UNMISSET), masih mempunyai kewenangan eksekutif atas keamanan internal dan pertahanan eksternal sampai pertengahan 2004. Walaupun konflik telah berakhir, sejumlah senjata buatan pabrikan belum dipertanggungjawabkan di dalam Timor Leste, dan sejumlah besar senjata tersebut dibagi kepada kelompok-kelompok milisi di Timor Barat, Indonesia. Proses pembangunan negara yang cukup rumit; perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR); serta pembentukan sektor keamanan yang independen, merupakan faktor yang menciptakan kondisi untuk masalah-masalah yang muncul di masa depan.

Kotak 1. *Rakitan*: menambahkan bahan bakar pada api

Rakitan adalah istilah Bahasa Indonesia yang berarti ‘barang yang dipasang’. Biasanya, *rakitan* adalah senjata buatan sendiri dan terdiri dari dua jenis utama: *bom rakitan* (granat buatan sendiri) atau *senjata rakitan* (senjata api buatan sendiri). Di Dili, apabila seorang menyebutkan *rakitan*, biasanya mengacu pada senjata api, walaupun *bom rakitan* juga ada.

Pembuatan dan pendistribusian *rakitan* sudah lazim di sebagian besar negara tetangga Indonesia selama periode kekerasan komunal atau SARA yang terjadi baru-baru ini. Dalam beberapa kasus, *rakitan* adalah canggih dan sangat efektif. Selama perkelahian komunal di Sulawesi pada tahun 2002, misalnya, kota Ampang memperoleh reputasi sebagai tempat pembuatan senjata mirip pistol dan bahkan M16. Amunisi yang diproduksi pabrik, yang sebagian dicap tanda TNI, dijual dengan harga Rp. 5,000 (USD 0.55) per unit.³¹ Dalam kasusnya konflik Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menggunakan *rakitan* dalam jumlah signifikan.³²

Rakitan biasanya agak sederhana dan pada dasarnya adalah pipa yang dipasang dengan gagang dan pegangan yang dirancang sebagai ‘musket jalanan’ yang diisi dari depan dan dapat menembakkan segala macam benda logam. *Rakitan* dapat mudah meledak ketika ditembakkan, dan maka menimbulkan resiko yang sama bagi pemakai maupun sasaran. Versi yang lebih canggih adalah pistol atau senapan yang diisi dari belakang yang dilengkapi pelatuk dan dapat menembakkan peluru. Senjata *rakitan* adalah sangat efektif, dan meningkatkan kejituan dan kecepatan

penembakan. Dalam kasusnya Timor-Leste, Kopassus (pasukan khusus Indonesia) mempunyai kebijakan dan praktek untuk mengajar anggota milisi tentang bagaimana dapat membuat *rakitan* di markas SGL, Dili. Program melatih pelatih ini menghasilkan sejumlah orang yang mampu membuat *rakitan*. Tentara Indonesia juga menyediakan material yang diperlukan untuk memasang senjata,³³ dan dalam kasus tertentu TNI juga mendistribusikan *rakitan*.³⁴ Pada tahun 2008 mudah untuk memesan pembuatan *rakitan* di Dili. Misalnya, Penilaian Kekerasan Bersenjata di Timor Leste (TLAVA) menghubungi seorang ‘tukang’ yang mampu memasang sebuah *rakitan* (yang kemudian dibongkar) dalam waktu kurang dari 24 jam.

Kekerasan yang terjadi di jalan didominasi oleh senjata tajam, dan sering ada persetujuan diam-diam untuk tidak menggunakan senjata api atau *rakitan*. Namun, *rakitan* dapat mengintimidasi, dan ketika perkelahian memburuk dan menimbulkan kekacauan, *rakitan* dapat secara signifikan meningkatkan dahsyat dan luasnya konflik. Jika *rakitan* menimbulkan kematian, dapat memicu serentetan kejadian yang tidak pernah diduga atau dimaksudkan sebelumnya oleh para pelaku. Dalam lingkungan dimana amunisi mudah didapat, *rakitan* semakin umum dan secara dramatis meningkatkan ketidakamanan di masyarakat. Selama *Operasi Kilat* yang diselenggarakan antara tanggal 15 Juli dan 31 Agustus 2008, anggota masyarakat menyerahkan 9,116 butir amunisi (5.56 mm x 2,854/7.62 mm x 116/12.4 mm x 1/lain x 6,145) dan 152 *rakitan*.³⁵

“sejumlah senjata buatan pabrikan belum dipertanggungjawabkan di dalam Timor Leste, dan sejumlah besar senjata tersebut dibagi kepada kelompok-kelompok milisi di Timor Barat”

Proses DDR menciptakan keadaan yang mudah meledak. Antara 1999 dan 2001, misalnya, para anggota FALINTIL ditempatkan dalam daerah kantonisasi di Aileu. Persaingan lama segera muncul dan menimbulkan masalah keamanan yang baru.³⁶ Sejumlah komandan dan anggotanya meninggalkan daerah kantonisasi itu setelah terjadinya perkecokan.³⁷ Selama periode ini, persediaan senjata api FALINTIL ditempatkan dalam dua kontainer yang diawasi bersama oleh FALINTIL-PBB. Daftar kepemilikan senjata api dari periode FALINTIL yang tertanggal antara 2004 dan 2005 memberi perincian yang signifikan tetapi tidak teratur (lihat Tabel 1). Untuk memuaskan aspirasi FALINTIL dan menangani keamanan di perbatasan, disetujui untuk membentuk angkatan pertahanan nasional yang dibagi dalam dua batalyon infantri ringan. Namun proses seleksi yang tertutup menimbulkan kecurigaan bahwa FALINTIL-*Forças de Defesa de Timor-Leste* (F-FDTL) yang baru dibentuk kurang representatif. Yang penting, PBB kehilangan haknya untuk mengamati persediaan senjata api FALINTIL yang kemudian dipindahkan ke Pusat Latihan Nicolau Lobato yang baru didirikan di Metinaro.³⁸ Untuk membekali infantri ringan, pada awalnya F-FDTL dilengkapi 1,200 senapan semi-otomatis M16A1 yang dipinjamkan sambil menunggu pengadaan senjata api nasional (lihat Tabel 1).³⁹

Tabel 1. Persediaan senjata api kecil dan ringan serta senjata yang telah dikumpulkan berdasarkan laporan, Timor-Leste, 1975–2008

Periode	Kategori	Senjata yang dinilai dan pemilik	Sumber dan tanggal penilaian
1975	Persediaan perang sipil	FALINTIL: 3,700 senapan G3, 15,000 Mauser, 'beberapa' senjata MG250, 20 mortir 81mm, 40 mortir 60 mm, 20 bazooka buatan-AS 3.5 inci, 6 howitzer Rheinmetal-Borsig 75 mm, sejumlah FBP9 (didasarkan MP40 buatan Jerman, senapan mesin Spandau MG34, Madsen Denmark, M3 buatan-AS, dan serupa)	Mayor Tentara Portugal F. Dentinho, petugas senjata/perengkapan perang, Dili (1975) ¹
		UDT: 1,000 senapan G3, 8,000 senapan Mauser, 6–7 mortir 81 mm	Mayor Tentara Portugal F. Dentinho, petugas senjata/perengkapan perang, Dili (1975) ²
		15,000 senjata G3, 12–15 mortir 81 mm, 12–15 mortir 60 mm, 'sejumlah kecil' bazooka, 'beberapa butir artileri tua', 'banyak' amunisi artileri yang dapat ditransformasi menjadi bahan peledak	Mayor Tentara Portugal. Fransisco Mota, petugas urusan politik (1975) ³
1975–99	Persediaan FALINTIL	Pada tahun 1988, sisa-sisa GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) secara fisik berjumlah 'kurang dari 244 orang . . . dan mereka memiliki kira-kira 217 buah senjata yang terdiri dari berbagai macam senjata ringan, panjang dan pendek.'	Komis Kebenaran dan Rekonsiliasi (2005) ⁴
		'Kira-kira 200 anggota FALINTIL, dengan 106 senjata	Komandan Jenderal yang bermarks di Bali, wilayah militer Udayana KODAM, meliputi Timor (1995) ⁵
		188 anggota FALINTIL dengan 88 senjata	BIA (Badan Intelijen ABRI) (1996) ⁶
		242 anggota FALINTIL dengan 127 senjata	Wakil FALINTIL yang dikutip dalam <i>Jawa Pos</i> (1999) ⁷
		1,350 anggota FALINTIL (naik dari jumlah 670 pada awal tahun itu karena ada perekrutan baru dan pengembalian para pejuang) dengan sekurang-kurangnya 237 senjata di pusat daerah terbatas di Aileu	UNAMET MLO (1999) ⁸
1999–2006	Persediaan bekas FALINTIL	Persediaan bekas F-FDTL: FALINTIL yang berjumlah 343 buah: 66 senjata SKS, 105 senjata SP, 41 senjata G3, 43 senjata M16, 9 senjata AR15, 19 senjata FNC, 5 senjata LE, 4 senjata FBP, 31 senjata Mauser, 3 senjata Metra, 1 senjata AK, 1 senjata Guerem, 3 senjata Ruger, 4 senjata Uzi, 45 Pistol, 2 Pistol 9 mm, 3 Pistol revolver, 1 Pistol Beret	F-FDTL, Divisi J4 (Januari 2004) ⁹
		Persediaan bekas F-FDTL: FALINTIL 338 buah: 13 senjata SS1, 7 senjata FNC, 51 senjata M16A1, 1 senjata AR15, 44 senjata SP1, 60 senjata SP2, 1 senjata SP342 G3, 64 senjata SKS, 32 senjata Mauser, 1 senjata Metra FNC, 3 senjata Ruger Mini 14, 1 senjata Galasi, 4 senjata FBP M63, 4 senjata Uzi, 2 senjata Metra/Minimi, 3 senjata LE, 1 senjata GRM 77, 3 Pistol	F-FDTL (Juli 2005) ¹⁰
		1,200 senjata milik pemerintah dan 342 senjata bekas FALINTIL (total 1,542)	Tim Internasional untuk Pemeriksaan Senjata Api (IWAT) (Juni 2006) ¹¹
1998–99	Persediaan pro-otonomi	Senjata dari TNI: sekurang-kurangnya 20 senapan SKS dan 1 senjata AK (ditransfer 27 Desember 1998); 3 senjata M16 (ditransfer 30 Desember 1998); 34 senjata G3, 18 senjata SP2, 8 senjata Mauser, 2 senjata LE, 35 buah senjata rakitan (ditransfer 26 Agustus 1999); 50 senjata SKS yang diberikan kepada berbagai milisi di desa Wehali, kecamatan Malaka Tengah, distrik Belu, Timor Barat (ditransfer 26 Oktober 1999)	'Komandan milisi A' yang dikutip dalam Komisi Kebenaran dan Persahabatan (2008) ¹²
		Dilaporkan bahwa 153 senjata SKS dikembalikan kepada TNI pada 5 April, 29 April, dan 16 Juni 2000, di Timor Barat.	
		Milisi Tim Saka (Baucau) pada Februari 1999: 19 senjata G3, 56 senjata SP2, 10 senjata SP1, 1 senjata Mauser, 1 senjata M16, dan senjata serbu lainnya; mungkin juga 1 senjata PMI/Pindad, 1 senjata FNC, 1 senjata AK	Komis Kebenaran dan Persahabatan (2008) ¹³
		Milisi Makikit (distrik Viqueque) pada 1998: 3 senjata M16, 35 senjata SP1, dan 11 senjata Garand, walaupun ada laporan-laporan yang berlawanan. Laksaur (distrik Cova Lima) mempunyai sekurang-kurangnya 10 senjata SKS, ¹⁴ dan Mahidi (distrik Ainaro) mempunyai 20 senjata SKS. ¹⁵	Komis Kebenaran dan Persahabatan (2008); ¹⁶ Pasukan Penjagaan Perdamaian UNTAET (PKF) (2001) ¹⁷
		Dilaporkan bahwa Komandan Korem (militer Timor Leste) membagi sekurang-kurangnya 600 senjata kepada milisi-milisi pada tanggal 31 Agustus 1999, dan mungkin kemudian membagi kira-kira 800 senjata tambahan, untuk tujuan 'tindakan penindasan terhadap para tokoh pro-kemerdekaan jika mereka menang'.	Surat dari Barisan Politik Internal CNRT (FPI) kepada Kantor Urusan Politik UNAMET (September 1999) ¹⁸
1999–2002	Senjata milisi pro-otonomi yang dikumpulkan dan/atau dihancurkan	Senjata milisi yang diserahkan kepada TNI: Senjata api (total 217): 10 senjata M16A1, 3 senjata FN35, 2 senjata FN46, 3 senjata SP1, 2 senjata SP2, 7 senjata Mauser, 28 senjata Getmi, 1 senjata Ruger, 1 senjata LE, 20 senjata campuran, 141 senjata SKS. Granat: 36 buah Manggis/Korea, 1 buah Nenas, 3 granat asap, 3 alat peluncur. Amunisi: 159 butir M16A1, 718 butir SKS, 8,625 butir G3/SP1, 34 butir Mauser, 214 butir Ruger, 31 butir FN45, 6 butir FN46, 2,402 butir SS1, 42 butir AK, 10 butir SMR, 53 butir Sten, 10 butir Colt, 60 butir M16A1, 24 butir SKS, 55 butir G3. Senjata generik: 628 senjata laras pendek dan 370 senjata laras panjang	Cohen (2003) ¹⁹
		Kelompok Komandan A: sejumlah senjata diserahkan kepada TNI oleh kelompok Komandan A pada 1999, tetapi kelompok ini masih aktif dan sebagian anggotanya membawa senjata. Daftar senjata lainnya yang masih dimiliki milisi, serta pemiliknya, disediakan baru-baru ini pada tahun 2005. ²⁰	'Komandan milisi A' yang dikutip dalam Komisi Kebenaran dan Persahabatan (2008)
		Senjata seberat 17 ton yang disita dari milisi dibuang ke dalam laut pada Mei 2000, yang mana sebagian besar disita pada bulan Oktober 1999 oleh Pasukan Internasional yang Dipimpin Australia di Timor Leste (INTERFET). Senjata tersebut termasuk pisau, tombak, panah dan busur, senjata api rakitan, pistol, senapan dan kantung peluru militer.	UNTAET (2000) ²¹
		Antara 1 Januari dan 28 Mei 2002, 50 senapan, 189 senapan buatan sendiri, 41 senapan tua, 267 granat, 10,442 peralatan militer, 74 kantung peluru, 2 ranjau darat anti personel, dan material lain dikumpulkan.	KODAM IX/Udayana dan Komando Tinggi PKF PBB (2002) ²²

Periode	Kategori	Senjata yang dinilai dan pemilik	Sumber dan tanggal penilaian
2002–08	Persediaan senjata PNTL (hilang)	219 senjata api PNTL hilang dari daftar PNTL, termasuk: 190 senjata Glock 9 mm, 13 senjata Steyers, 10 senjata HK33, 2 senjata FNC, dan 4 shotgun berkaliber 12mm. Ketujuh senjata F2000 telah dipertanggungjawabkan. Tidak ada laporan tentang persediaan amunisi.	IWAT (September 2006) ²³
		44 senjata api PNTL hilang, termasuk 20 senjata Glock 9 mm, 1 senjata Steyr, 1 shotgun berkaliber 12mm, 2 senjata FNC, dan 20 senjata HK33	Department Investigasi Nasional (Mei 2007) ²⁴
		15 senjata api PNTL hilang: 5 senjata HK33 dan 10 senjata Glock 9 mm; walaupun kemudian Komisaris PNTL Afonso de Jesus mengatakan bahwa 20 senjata Glock 9 mm milik PNTL masih hilang	Inspektur Senior PNTL (Juni 2008); ²⁵ Timor Post (Agustus 2008) ²⁶
		16 senjata Glock 9 mm yang hilang (nomor seri EFP139, EFP140, EFP203, EFP608, EFP777, EFP790, EFP806, EFP 926, EFP993, EEH 690, EEH773, FGT466, FGT482, FHX267, FHX272, FHX370), pada tanggal 14 Juli 2008 4 senapan HK33 yang hilang (nomor seri ATM 000790, ATM 014779, ATM020163, ATM 016989) pada tanggal 11 Juli 2008 1 senjata STC yang hilang, 1 buah shotgun berkaliber 12mm (nomor seri R336462), pada tanggal 11 Juli 2008	Departemen Logistik Nasional, Bagian Gudang Senjata, PNTL (11 dan 14 Juli 2008)
2002–08	Persediaan senjata F-FDTL	1,200 senjata milik pemerintah dan 342 senjata bekas FALINTIL (total 1,542) dimiliki F-FDTL, walaupun ada perbedaan sebanyak 30 senjata M16 dalam angka untuk senjata pemerintah. Pada bulan November 2005 F-FDTL hanya dapat mempertanggungjawabkan 1,073 senjata M16. ²⁷	IWAT (Juni 2006) ²⁸
		Pada tanggal 9 Juni 2006 IWAT diberitahu bahwa F-FDTL memiliki 1,200 senjata pemerintah dan 342 senjata bekas FALINTIL. Hasil temuan IWAT menyatakan bahwa pemeriksaan pada tahun 2002 menunjukkan bahwa F-FDTL memiliki 1,200 senjata M16A2. Namun, pada Februari 2004, pemeriksaan menunjukkan bahwa ada 30 senjata tambahan merek M16A2. Namun, tidak ada laporan resmi tentang pengimporan selanjutnya. Pada November 2005 hanya 1,073 senjata M16A2 dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan IWAT pada Juni 2006 mengungkapkan total 1,190 senjata M16A2, yaitu ada kelebihan 117 senjata jika dibanding jumlah yang dipertanggungjawabkan dalam penghitungan sebelumnya. Selain itu, ketika persediaan saat ini dibandingkan dengan catatan tahun 2002, 46 senjata M16A2 hilang. F-FDTL memiliki 1 senjata Minimi, 1 senjata .38 Special, 1 senjata Browning 9 mm, 2 senapan semi otomatis G3, 1 senjata M16A1, dan 1 senjata berkaliber M2 .50 yang tidak dihitung sebelumnya. Selain itu, F-FDTL tidak lagi memiliki 3 senapan semi otomatis FNC, 3 senapan semi otomatis SKS dan 2 senjata Uzi yang dihitung sebelumnya.	IWAT (Juni 2006) ²⁹
		Amunisi: 427,560 butir amunisi 5.56 mm, tetapi menggunakan 238,813 butir dalam latihan dan operasi, yang mana 19,013 butir digunakan selama krisis; 45,920 butir amunisi tracer 5.56 mm; 21,905 butir amunisi kaliber .45, tetapi telah menggunakan 10,462 butir dalam latihan dan operasi; dan 3,720 granat K413, yang mana 161 buah belum digunakan. Tidak jelas berapa buah masih ada dalam kategori-kategori tersebut.	Daftar Umum Amunisi, F-FDTL (2006) ³⁰

Catatan kaki

- Informasi diberikan di Darwin, 3 September 1975 (komunikasi email dengan Brigjen Tentara Australia (purnawirawan) Ernest Chamberlain, 25 Agustus 2008).
- Informasi diberikan di Darwin, 3 September 1975 (komunikasi email dengan Brigjen Tentara Australia (purnawirawan) Ernest Chamberlain, 25 Agustus 2008).
- Informasi diberikan di Lisbon, 4 September 1975. Dia menyarankan bahwa amunisi dan artileri tua yang tidak dapat digunakan (komunikasi email dengan Brigjen Tentara Australia (purnawirawan) Ernest Chamberlain, 25 Agustus 2008).
- CAVR (2005), bagian 4, h. 13.
- Dikutip dalam Della-Giacoma (1995).
- Informasi termuat pada peta BIA yang disimpan dalam arsip penulis laporan.
- Herman (1999); komunikasi email dengan Brigjen Tentara Australia (purnawirawan) Ernest Chamberlain, 25 Agustus 2008.
- Komunikasi email dengan Brigjen Tentara Australia (purnawirawan) Ernest Chamberlain, 9 Juni 2008.
- Lista do Material das FALINTIL, J4 Division, F-FDTL, 15 Januari 2004. Tidak termasuk senjata api yang digunakan oleh Pengawal Brigjen Taur Matan Ruak.
- Lista Kilat Tuan, Quartel em Metinaro, F-FDTL, 12 Juli 2005.
- OHCHR (2006), h. 42. Jenis senjata ini tidak jelas (OHCHR, 2006, h. 42). Ini sangat menarik karena setidaknya-tidaknya 35 buah dari senjata ini tetap digunakan oleh F-FDTL pada tahun 2006.
- KKP (2008), h. 197.
- KKP (2008), h. 229.
- KKP (2008), h. 198.
- Robinson (2003), h. 109.
- KKP (2008), h. 233.
- Pada April 1999 beberapa laporan memperkirakan bahwa Mahidi mempunyai 2,000 anggota dengan 500 senjata api, tetapi NGO-NGO lokal mengatakan bahwa angka yang sebenarnya adalah kira-kira 1,000 anggota dan 37 senjata api (UNTAET PKF, 2001).
- Dikutip dalam Robinson (2003) h. 81.
- Cohen (2003), h. 99–101.
- KKP (2008), h. 224.
- UNTAET, Tais Timor, 1–14 Mei 2000.
- Berita acara dari Rapat Antar-Komando ke-12 (diselenggarakan antar KODAM IX/Udayana dan Komando Tinggi PKF PBB) di Handara Kosaido Hotel, Pancasari, Bali Utara, 29–31 Mei 2002.
- IWAT termasuk wakil dari PBB, Timor-Leste, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Portugal, dan Amerika Serikat.
- Departemen NID yang mendukung Kantor Jaksa Agung menyatakan pada tanggal 17 Mei 2007 bahwa senjata api PNTL tersebut hilang (Victorino, 2007).
- Wawancara dengan inspektur senior PNTL, 19 Juni 2008.
- Timor Post (2008b).
- OHCHR (2006), h. 41.
- OHCHR (2006), h. 42. ICoI mencatat bahwa jenis senjata ini tidak jelas (h. 42). Ini sangat menarik karena setidaknya-tidaknya 35 buah dari senjata ini tetap digunakan oleh F-FDTL pada tahun 2006.
- Lihat catatan sebelumnya.
- Daftar Umum Amunisi, F-FDTL, 5 Juni 2006.

Pada 2000 ada peningkatan penyerangan lintas perbatasan oleh milisi pro-otonomi yang didukung oleh unsur tertentu dalam TNI. Hal ini menimbulkan ketakutan yang signifikan. Ada juga semakin banyak keprihatinan bahwa milisi tersebut bersenjata dan jumlahnya meningkat.⁴⁰ Walaupun kerugiannya cukup rendah, semakin dipercaya bahwa situasi tidak aman. Penyerangan tersebut mempercepat pembentukan F-FDTL. Ancaman tersebut dianggap begitu serius sehingga para penjaga perdamaian UNTAET memperoleh izin dari markas PBB di New York untuk menggunakan penyerangan yang mendahului dan kekuatan mematikan terhadap kelompok milisi yang melintasi perbatasan. Hal ini langsung mengurangi jumlah penyerangan lintas perbatasan. Demikian pula, tekanan politik dari masyarakat internasional dan keprihatinan yang meningkat tentang sifat merampas dari kelompok-kelompok milisi tersebut memaksa Indonesia mengambil tindakan yang lebih tegas untuk melucuti senjata milisi. Akibatnya, TNI melakukan beberapa upaya serius untuk melucuti senjata milisi pada 2001 dan 2002, walaupun keefektifan upaya ini diperdebatkan.⁴¹

Kekerasan yang dipimpin milisi tidak menghilang. Pada bulan Januari dan Februari 2003 penyerangan dilakukan di Atsabe, Ermera, dan Atabae, Bobonaro dimana beberapa orang mati.⁴² Sebagai jawaban atas permintaan Pemerintah Timor Leste, UNMISSET menugaskan F-FDTL untuk melakukan operasi sementara di distrik Ermera. Operasi keamanan yang kemudian dilakukan oleh F-FDTL dikritik oleh sebagian orang Timor Leste dan pengamat internasional karena dianggap menggunakan kekuatan yang berlebihan.⁴³ Tetapi jumlah dan intensitas penyerangan milisi tetap sama. Pada tanggal 24 Februari 2003 sebuah kelompok kecil, yang juga digambarkan sebagai milisi pidana atau pro-otonomi, yang bersenjata otomatis menyerang Atabae, Bobonaro dari lintas perbatasan.⁴⁴ Pada saat itu, F-FDTL tidak dikirim karena ada preferensi agar PBB mengambil tindakan.⁴⁵ Pada saat itu, sejumlah senjata yang tersembunyi ditemukan di daerah itu,⁴⁶ tetapi dipercaya bahwa para penyerang di Atabae hanya memiliki tiga senapan SKS.⁴⁷

Sebagai akibat dari penyerangan milisi yang berkelanjutan, perhatian difokuskan kembali atas keperluan untuk memperkuat sektor keamanan Timor Leste yang baru dibentuk. Lembaga kepolisian Timor Leste (*Polícia Nacional de Timor-Leste*—PNTL) dibentuk pada 2000, tetapi cara pembentukannya dan tingkah laku anggotanya di kemudian hari melemahkan keabsahannya. Dalam perekrutan awal, UNTAET menggunakan kelompok utama orang asal Timor Leste mantan POLRI, yang menciptakan ketidakselarasan antara PNTL dan banyak anggota masyarakat, dan sekaligus antara PNTL dan angkatan bersenjata yang baru dibentuk. Lagipula, PNTL dipersenjatai oleh Polisi PBB (UNPol) dengan

sejumlah besar pistol semi-otomatis Glock 9 mm, yang sebagian diarahkan pada orang sipil antara 2001 dan 2002.⁴⁸ Reaksi negatif yang paling vokal terhadap F-FDTL maupun PNTL dikemukakan oleh berbagai macam organisasi veteran pada 2001.⁴⁹

Kelompok-kelompok veteran yang bermotivasi politik termasuk dalam sejumlah kelompok non-pemerintah yang baru, yang semakin menonjol antara 2001 dan 2004,⁵⁰ bersama dengan kelompok atau gerombolan 'bela diri'⁵¹ dan 'gerakan sosial'.⁵² Dalam kebanyakan kasus, kelompok-kelompok tersebut menggunakan senjata tajam tradisional, dan dalam kasus tertentu, *rakitan*. Hanya sedikit sekali, kalau ada, memiliki senjata api kecil yang modern. Walaupun organisasi tersebut sering menentang negara, dan oleh karena itu sekaligus menentang PNTL and F-FDTL, mereka juga cukup berbobot pada tingkat komunitas dan berpikir bahwa bawahannya mampu menjaga keamanan dengan cara yang berarti. Demikian pula, afiliasinya dengan para penjaga keamanan publik⁵³ juga memberi akses sporadis pada senjata api kecil untuk tujuan politik atau pidana.⁵⁴ Sebagian polisi sekaligus menjadi anggota dalam beberapa kelompok tersebut (khususnya kelompok bela diri), dan secara spesifik kelompok bela diri PSHT⁵⁵. Satu kelompok dianggap begitu berbahaya sehingga Presiden melakukan intervensi pada 2003. Di distrik Covalima yang terletak di pantai selatan pernah ada kelompok bersenjata yang terdiri dari berbagai macam veteran yang disebut 'isolados' (orang terasing).⁵⁶ Pada September 2003 Presiden Xanana Gusmão meminta bantuan logistik dari PBB untuk membantu para perantarnya meyakinkan kelompok tersebut untuk 'menyerahkan senjata yang dimilikinya dan bertemu dengan saya'.⁵⁷

Milisi dan kelompok penentang masih melakukan tindakan pada 2003 sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk membentuk dan kemudian memberi senjata kepada unit-unit polisi paramiliter. Ini termasuk antara lain, UIR, UPF dan URP,⁵⁸ yang mana URP dan UPF dibentuk untuk melakukan patroli di perbatasan, dan melindungi orang sipil dari penyerangan lintas perbatasan oleh milisi serta pemberontakan di daerah pedesaan. Rupanya bahwa perekrutan ke dalam unit-unit tersebut sengaja dipolitikkan oleh Rogerio Lobato, Menteri dalam Negeri. Pembentukan unit paramiliter disambut dengan keprihatinan oleh F-FDTL, yang merasa bahwa unit-unit tersebut secara politik dan praktis telah menganggu peranannya sebagai penjaga keamanan. Banyak orang sipil juga merasa bahwa polisi paramiliter menimbulkan ancaman pada keselamatannya. Dengan melihat bahwa tujuan dari pembentukan unit polisi khusus ini kurang bijaksana, UNMISSET menolak upaya dari Lobato untuk mendapatkan senjata api yang akan dibagi kepada unit-unit tersebut.

Periode Timor Leste (2004–08): dari kemerdekaan sampai krisis

Setelah pemindahan tanggungjawab atas keamanan internal dan pertahanan eksternal dari PBB kepada Timor Leste pada 2004, pemerintah segera mulai mendapatkan senjata api baru. Pengiriman pertama diterima dari Malaysia yang terdiri dari 180 senapan serbu semi-otomatis HK33 bagi URP, unit polisi cadangan. Selain itu, pada September 2004, pemerintah membeli 200 senapan serbu semi-otomatis Steyr bagi UPF, until patroli perbatasan. Selain itu, 66 senapan serbu semi-otomatis FNC dan 7 senjata otomatis F2000 juga dibeli untuk UIR, unit reaksi cepat (lihat Tabel 1). Walaupun pembelian senjata HK33 dan Steyr memerlukan pemindahan dari satu negara ke negara lain, seorang perantara di Dili membeli senjata FNC dan F2000 secara langsung dari FN Herstal⁵⁹ atas permintaan pemerintah. F-FDTL tidak menyembunyikan ketidakuasannya atas pembelian tersebut.⁶⁰ Pada 2005 Kementerian Dalam Negeri juga membeli 257,000 butir amunisi 5.56 mm dengan harga USD 107,940 dari Cavallo Bravo,⁶¹ sebuah perusahaan yang dimiliki Bader Alkatiri, saudara laki-laki Perdana Menteri saat itu.⁶²

Yang signifikan, pembelian senjata api dan amunisi tidak diperiksa atau diawasi secara sah oleh Parlemen. Ketika kelompok-kelompok masyarakat sipil mempersoalkan pembelian tersebut, protes mereka ditolak dan mereka dikritik oleh para politikus yang berkuasa.⁶³ Undang-Undang Organik PNTL menyatakan bahwa, 'PNTL bertanggungjawab eksklusif untuk mengendalikan pembuatan, penyimpanan, penjualan, penggunaan dan pemindahan senjata, amunisi [dll.] ... yang tidak dimiliki oleh Angkatan Bersenjata atau pasukan keamanan lain yang diakui dalam undang-undang'.⁶⁴ Yang menarik, bagian-bagian lain dari pemerintah juga mengeluarkan izin untuk menyediakan senjata dan senjata api.⁶⁵

Ketegangan antara pemerintah dan sebagian masyarakat masih terjadi antara 2004 dan 2006. Pada bulan Juli 2004 seorang veteran dan mantan anggota FALINTIL Elle Sette mengadakan demonstrasi di depan Gedung Pemerintah. UIR membubarkan demonstrasi dengan menggunakan gas air mata dan pentung, sebagai unjuk kekuatan yang kemudian dikutuk karena menggunakan kekuatan yang berlebihan. Pada bulan April 2005 Gereja Katolik memimpin demonstrasi besar anti-pemerintah yang mengimbau Perdana Menteri Alkatiri untuk mengundurkan diri. Banyak orang berpikir bahwa kejadian ini mendahului krisis. Setelah pecahnya kekerasan pada April dan Mei 2006 (lihat Kotak 2), masyarakat internasional dipanggil untuk memulihkan kembali ketertiban. Gugus Tugas Bersama 631 yang dipimpin oleh Australia mencegah perang, walaupun ketidakamanan masih muncul sekali-sekali dan perkelahian komunal antar kelompok *lorosae/loromunu* (Timur/Barat) dan pembakaran tetap terjadi setelah kedatangan mereka.

Kotak 2. Krisis 2006 dan pendistribusian senjata

Dari tanggal 24 sampai 28 April 2006 ratusan serdadu F-FDTL, yang dipimpin oleh Lt. Gastão Salsinha, melakukan demonstrasi di luar Gedung Parlemen di Dili. Setelah petisi dikirim pada bulan Januari kepada Presiden yang memuat pengaduan tentang diskriminasi, 'para pemohon petisi' meninggalkan pos tanpa membawa senjata dan dipekat pada bulan Maret. Pada tanggal 28 April demonstrasi menimbulkan kekerasan. Sejumlah orang dibunuh dan dilukai. Menteri Dalam Negeri bereaksi dengan memerintahkan semua komandan seniornya untuk 'bunuh mereka semua' dan mempersenjata diri dengan sebuah F2000 dan 2,000 butir amunisi.⁶⁶

F-FDTL dipanggil ke kota sebagai upaya untuk memulihkan ketertiban. F-FDTL diserang oleh granat dan bereaksi dengan membunuh beberapa orang. Ada tuduhan tidak benar bahwa F-FDTL membantai 60 orang. Namun, karena F-FDTL sebagian besar terdiri dari orang bagian timur (*lorosae*) dan para pemohon petisi adalah orang bagian barat (*loromunu*), desas-desus tentang pembunuhan massal dipercaya dan tidak lama kemudian kedua komunitas tersebut diadudombakan. Mayor Alfredo Reinado, komandan polisi militer, meninggalkan posnya pada tanggal 3 Mei dan, bersama dengan 17 anggotanya dan dua anggota UIR, membawa sejumlah kecil senjata api dan banyak amunisi. Beberapa hari kemudian sejumlah serdadu F-FDTL pergi bersama Mayor Tara dan juga membawa senjata apinya.

Selama periode ini, lembaga kepolisian mulai terpecah-belah. Pada tanggal 9 Mei seorang petugas PNTL asal *lorosae* mati dalam demonstrasi di Gleno Ermera, sebuah pusat bagi para pemohon petisi asal bagian barat, yang membuat PNTL mengalami pemecahan komunal yang serupa. Pemandahan senjata dengan cara tidak teratur, pada khususnya senapan dan amunisi PNTL,⁶⁷ memicu kecurigaan dan terseretnya ke dalam konflik. Pada saat itu Komisararis PNTL kadang-kadang mengambil senjata api dari Gudang Senjata Nasional PNTL tanpa pengetahuan petugas gudang senjata.

Misalnya, pada tanggal 23 Maret, 60 senjata Steyr dikirim ke URP Aileu, dan pada tanggal 15 April, 10 senjata Steyr dikirim ke kantor polisi Liquiça. Pada tanggal 11 dan 21 Mei sekelompok PNTL bersenjata Steyr dan dipimpin oleh Wakil Komandan Distrik Dili Abilio Mesquita (seorang pemimpin PSHT). Setelah melucuti senjata para anggota PNTL dalam UPF yang berasal dari bagian timur, pada tanggal 8 dan 21 Mei Menteri Lobato secara rahasia memberi 18 senjata HK33 dan 6,000 butir amunisi 5.56 mm kepada milisi sipil yang dipimpin oleh mantan veteran F-FDTL Rai Los.⁶⁸ Pada tanggal 17 Mei 2008 Brigadir Jendral Taur Matan Ruak menulis surat kepada Perdana Menteri dan memohon pemeriksaan terhadap persediaan senjata api F-FDTL sebagai jawaban atas tuduhan bahwa orang-orang sipil diberi senjata oleh angkatan bersenjata. Ada juga banyak desas-desus tentang pengimporan senjata api secara rahasia, yang sampai sekarang masih beredar.

Pada tanggal 23 Mei Mayor Reinado dan 11 anggotanya, bersama 10 petugas URP yang bersenjata Steyr, melawan serombongan anggota F-FDTL dalam benturan dahsyat di bagian timur kota Dili. Pada tanggal 24 Mei PNTL dan sekelompok milisi sipil yang dipimpin oleh Rai Los yang bersenjata HK33, yang disediakan oleh Menteri Dalam Negeri, menyerang F-FDTL di bagian barat kota Dili. Selain itu, pada tanggal 24 Mei Sub-Inspektur Mesquita menyerang kediaman Kepala Angkatan Bersenjata. F-FDTL membalas dengan mendistribusikan 200 senjata M16A2 kepada para veteran dan anggota PNTL yang simpatisan. Pada tanggal 25 Mei, PNTL dan F-FDTL terlibat dalam tembak-menembak di antara masing-masing markasnya di pusat Dili dan sejumlah anggota F-FDTL dan PNTL dibunuh dan dilukai. Secara keseluruhan, 37 orang mati, 150,000 orang melarikan diri dari rumahnya, dan ribuan rumah dihancurkan. Kejadian 2006 secara signifikan didorong oleh pendistribusian senjata api dan pemindahan senjata api yang tidak teratur.

Menangani ketidaktertiban: pemeriksaan senjata api dan intervensi lain

Keprihatinan besar setelah krisis 2006 adalah status inventaris senjata api dan gudang senjata. Dalam beberapa minggu setelah kejadian tersebut, Tim Internasional untuk Pemeriksaan Senjata Api (IWAT)⁶⁹ menyelesaikan peninjauan atas senjata api F-FDTL pada tanggal 26 Juni. Pengendalian dan pengelolaan senjata api F-FDTL dianggap lebih baik daripada PNTL. IWAT menemukan bahwa F-FDTL memiliki sejumlah senjata api yang sebelumnya tidak diketahui dan bahwa F-FDTL tidak mengetahui keberadaan sejumlah senjata lain. Catatannya juga tidak jelas tentang persediaan amunisi dan granat (lihat Tabel 1). Rekaman video amatir yang dibuat pada 25 Mei menunjukkan para veteran yang diberi senjata oleh F-FDTL di pusat Dili dan memberi indikasi bahwa amunisi dibagi secara sembarang saja.

IWAT juga menyelesaikan peninjauan atas persediaan senjata api PNTL pada tanggal 24 September. Pengedaran senjata PNTL antara para penduduk dianggap saat itu sebagai hal yang cukup menghalangi pemeriksaan. Laporan akhir mencatat bahwa para petugas PNTL sering memindahkan senjata tanpa izin sah. PNTL juga dikritik atas praktek 'perintah lisan [yang digunakan] oleh para pemimpin senior PNTL untuk mendistribusikan senjata api dan amunisi, dan juga karena amunisi tidak dapat dipertanggungjawabkan setelah dikeluarkan dari Gudang Senjata Nasional PNTL.⁷⁰ IWAT tidak menyerahkan hasil temuan apa pun tentang persediaan amunisi PNTL (lihat Tabel 1).

Tetapi banyak senjata juga tetap berada di luar pengendalian publik. Tidak lama setelah Reinado menyatakan bahwa dia telah menyerahkan senjata kepada Gugus Tugas Bersama 631 pada Juli 2006, Reinado ditangkap di Dili karena memiliki senjata (tambahan). Reinado dan para pengikutnya melarikan diri dari penjara pada bulan Agustus 2006. Pada tanggal 25 Februari 2007 Reinado sekali lagi mempersenjata diri dengan mengambil sejumlah kecil senjata HK33 dari pos perbatasan UPF di Covalima. Pada bulan Maret Pasukan Stabilisasi Internasional menyerang pangkalan Reinado di Same, Manufahi. Beberapa orang mati, sedangkan Reinado dan beberapa pengikutnya melarikan diri. Selama sisa 2007 Timor Leste mengalami ketidakamanan yang signifikan, baik di Dili maupun distrik lain. Mayor Reinado dan kelompoknya yang bersenjata menjadi fokus bagi remaja dan gerombolan yang merasa tidak puas di Dili, tetapi juga memperkuat perasaan tidak aman antara para pengungsi dalam negeri. Dengan adanya semakin banyak pembunuhan yang bermotivasi politik dan kejahatan, kelompok dan gerombolan bela diri semakin menonjol dan aktif, yang sebagian diakibatkan akses yang lebih mudah terhadap senjata.⁷¹



Para anggota Satuan Tugas Bersama 631 dari Pasukan Angkatan Bersenjata Australia, Dili, Timor-Leste © ADF 2006

Setelah pengumuman bahwa *Aliança para Maioria Parlamentar* (AMP) akan membentuk pemerintahan koalisi baru, sebuah kelompok bersenjata tembak-menembak dengan konvoi PBB di Baucau pada tanggal 10 Agustus 2007.⁷² Pada tanggal 5 Oktober 2007 granat dilemparkan ke dalam halaman Program Kerjasama Angkatan Bersenjata Australia di pusat Dili. Pada bulan Februari 2008 sebuah kejadian menjadi berita pokok di seluruh dunia, yaitu kelompok Reinado menyerang Presiden dan Perdana Menteri. Presiden Ramos-Horta mengalami luka kritis, sedangkan kelompok yang dipimpin oleh Gastao Salsinha gagal dalam usahanya untuk menghadang Perdana Menteri Gusmão. Suatu keputusan yang diambil Ramos-Horta menimbulkan akibat dahsyat kepada diri sendiri, yaitu ada kemungkinan bahwa senjata-senjata HK33 yang diterima Pemerintah dari Malaysia ketika Ramos-Horta adalah Menlu, tidak sampai empat tahun kemudian digunakan untuk menembak Presiden Ramos-Horta.

Intervensi keras dan halus

Pemerintah mengadopsi berbagai macam tindakan tegas terhadap peningkatan kekerasan bersenjata. 'Keadaan darurat' nasional diumumkan pada hari penembakan, dan pada tanggal 17 Februari pemerintah membentuk Komando Operasi Bersama (KOK), sebuah gabungan F-FDTL/PNTL, dan F-FDTL mengambil kendali atas operasi bersama⁷³ Hampir seketika, KOK memulai 'Operasaun Halibur',⁷⁴ yang dirancang untuk menekan kelompok bersenjata sambil negosiasi politik dilakukan agar mereka menyerahkan

diri secara berdamai. Selain itu, unit-unit polisi paramiliter PNTL diberi (kembali) senapan laras panjang langsung setelah terjadinya penyerangan tanggal 11 Februari.

Kegiatan tersebut mendapatkan beberapa hasil konkrit. Pada bulan maret 2008 Amaro 'Susar' da Costa, anggota senior yang ikut serta dengan Reinado, menyerahkan diri bersama senjata-senjatanya. Pada akhir April Gastao Salsinha dan sisa kelompoknya menyerahkan diri bersama senjata-senjatanya yang berasal dari periode Portugal, Indonesia dan masa sekarang (misalnya 9 senjata HK33, 1 senjata Mauser, 1 senjata SKS dan 1,386 butir amunisi)⁷⁵ Dengan melihat ke belakang, jelas bahwa para pemberontak yang bertahan sekian lama sudah mengambil bekas senjata dan amunisi milik negara dari persediaan terbatas untuk memeras negara tersebut selama kurang lebih dua tahun. Ada ketidakcocokan dalam statistik tentang jumlah senjata yang dikumpulkan selama Operasi Halibur. Letkol Meno Paixao (F-FDTL) dikutip oleh sebuah terbitan resmi mengatakan bahwa KOK mengumpulkan 29 senjata api (25 senapan dan 4 senjata genggam), selain 7 granat dan 4,547 butir amunisi.⁷⁶ Sumber-sumber lain mengatakan bahwa *Operasi Halibur* hanya mengumpulkan 12 senjata HK33, 1 senjata M16A2, 1 senjata FNC, 1 senjata Minimi, 2 senjata Mauser, sejumlah *rakitan*, amunisi, dan granat. Yang penting, *Operasi Halibur* juga mengumpulkan empat senapan mesin ringan dengan bipod yang dinyatakan telah diselundupkan dari Indonesia, karena tidak diketahui oleh F-FDTL dan PNTL.⁷⁷ Namun, senjata tersebut kemungkinan besar adalah jenis G3 yang menggunakan "bipod ringan".

"para pemberontak yang bertahan sekian lama sudah mengambil bekas senjata dan amunisi milik negara dari persediaan terbatas untuk memeras negara tersebut selama kurang lebih dua tahun."

Pemerintah Timor Leste juga melakukan dua intervensi yang 'lebih halus' untuk mengendalikan resiko yang ditimbulkan oleh penyediaan senjata api, misalnya merancang perundang-undangan dan penyerahan senjata secara sukarela. Pertama, pada 2008 pemerintah ingin mencabut kerangka hukum untuk senjata api kecil, sambil sekaligus ingin mendorong para penduduk untuk secara sukarela menyerahkan senjata kepada pihak yang berwenang. Secara khusus, pada tanggal 9 Juni 2008 sebuah undang-undang tentang senjata api (Undang-Undang tentang Senjata Api No. 9/11/2008) diserahkan oleh Dewan Menteri untuk dipertimbangkan oleh Komite B dari Parlemen yang menangani Urusan Luar Negeri, Keamanan Nasional dan Pertahanan.⁷⁸ Penilaian awal terhadap rancangan undang-undang (RRU) oleh Penelitian Senjata Api Kecil menemukan bahwa RRU tersebut memuat batasan dan kekurangan tertentu yang berpotensi untuk *meningkatkan* jumlah senjata api di tangan orang sipil.⁷⁹ Para aktor masyarakat sipil secepatnya menyampaikan keprihatinannya (Lihat Kotak 3).

Kotak 3. Reaksi masyarakat sipil terhadap rancangan undang-undang tentang senjata api

Undang-Undang Senjata Api No. 9/11/2008 dirancang oleh Kementerian Kehakiman dan dipertimbangkan oleh Dewan Menteri.⁸⁰ Kemudian RRU tersebut diserahkan kepada komite parlemen yang tepat untuk dipertimbangkan tanpa berkonsultasi dengan masyarakat sipil dan mitra eksternal lainnya.⁸¹ Ketika mulai didebatkan dalam sesi pleno di Parlemen, langsung menimbulkan masalah politik yang mudah meledak. Yang menimbulkan keprihatinan terbesar adalah Pasal 4, yang mengusulkan bahwa Komandan Polisi adalah satu-satunya orang yang berwenang untuk memutuskan orang sipil mana saja yang boleh memiliki senjata api. Hal ini justru tidak lazim, dengan mengingat bahwa kewenangan ini sekarang dimiliki oleh Komisaris PNTL, yang diberi kewenangan oleh Peraturan Pemerintah No. 8/2004. RRU tersebut juga tidak mengatur tentang pengelolaan dan keamanan gudang senjata.

Sejumlah anggota senior dari pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil membantah RRU tentang senjata api. Presiden Ramos-Horta menyuarakan keprihatinannya, dan menyarankan bahwa dia akan memveto RRU tersebut.⁸² Mario Carrascalao, Presiden PSD, salah satu partai utama dalam pemerintahan koalisi AMP yang dipimpin oleh Gusmão, menyarankan bahwa beberapa pengusaha mendorong RRU tersebut.⁸³ Dilaporkan bahwa Uskup Baucau, yang cukup berpengaruh, telah mengatakan bahwa undang-undang baru tentang senjata api dapat menciptakan dan meningkatkan kebudayaan kekerasan, dan pemerintah seharusnya tidak memprioritaskan pemberian senjata api kepada orang sipil, karena orang tidak dapat 'makan senjata api'. Selain itu, dia mengatakan bahwa program pengumpulan senjata api yang diusulkan, apabila dibandingkan dengan undang-undang tentang senjata api, saling berlawanan dan membingungkan. Dia

juga mengatakan bahwa kalau sebagian orang boleh membawa senjata api, akan menciptakan situasi dimana orang lain menginginkan senjata api, melalui secara sah atau tidak sah (dan oleh karena itu akan menciptakan pasar gelap untuk senjata api).⁸⁴

Walaupun demikian, para pihak yang betul-betul mendukung RRU ini sudah yakin bahwa RRU ini harus disahkan. Pada tanggal 22 Agustus 2008 dilaporkan bahwa Fernando 'Lasama' de Araujo, Ketua Parlemen Nasional, mengatakan bahwa pengendalian senjata api adalah penting, dan bahwa maksud dari RRU ini bukan untuk secara sembarang membagi senjata kepada orang sipil, dan bahwa RRU tentang senjata api adalah prioritas bagi Parlemen jika kembali beroperasi setelah masa resesnya pada tanggal 15 September 2008.⁸⁵

Selain daripada upaya untuk merevisi kerangka hukum, pemerintah memulai program pengumpulan senjata api/amnesti nasional yang dipanggil *Operasi Kilat* pada tanggal 15 Juli 2008. Otoritas publik hanya melakukan upaya terbatas untuk menjelaskan secara luas tujuan dan obyektif dari program pengumpulan ini, selain daripada mengambil kembali senjata dari tangan orang sipil, baik dari periode pra-1999 maupun pasca-1999. Perdana Menteri Gusmão mengeluarkan pengumuman yang terlambat di televisi nasional pada tanggal 31 Juli 2008. Menurut jadwal pertama program ini akan berakhir pada 15 Agustus, namun diperpanjang sampai tanggal 30 Agustus. Hasilnya dilaporkan sedikit demi sedikit, dan dalam kasus tertentu, hasilnya berlawanan: beberapa laporan mengindikasikan bahwa ada senjata otomatis yang dikumpulkan dan laporan lain menunjukkan sebaliknya. Yang jelas, selain daripada banyaknya senjata tajam yang dikumpulkan, sejumlah granat dan cukup banyak amunisi dan senjata api buatan sendiri juga dikumpulkan.⁸⁶

TLAVA memperoleh angka awal tentang jumlah senjata api yang diserahkan sebagaimana dihimpun oleh operasi penjagaan perdamaian PBB, Misi Terpadu Perserikatan Bangsa-Bangsa di (UNMIT). Rupanya angka tersebut memberi indikasi awal bahwa ada kebingungan tentang hasil program pengumpulan *Operasi Kilat*. Pada dasarnya, angka tersebut menunjukkan bahwa senjata berikut dikumpulkan antara tanggal 15 Juli dan 31 Agustus 2008: 1 senjata HK33, yang diperoleh di Oecusse;⁸⁷ 152 *rakitan*;

712 senapan angin; 9,116 butir amunisi yang beraneka ragam; 48 granat; dan 7,930 senjata tradisional (lihat Tabel 2). Rupanya bahwa keberadaan senjata api dan bahan peledak buatan sendiri barangkali meningkat sejak 2006. Jumlah *Rakitan*, pada khususnya, cukup tinggi, yang sebagian disebabkan ketersediaan amunisi (khususnya yang berukuran 5.56 mm).⁸⁸

Angka awal tersebut juga memberi indikasi tentang kecenderungan yang muncul. Misalnya, dalam satu kasus, 600 peluru diserahkan, yang menunjukkan bahwa orang sipil memiliki jauh lebih banyak persediaan daripada diduga pada umumnya.⁸⁹ Dalam kasus lain, yang berlawanan dengan angka UNPol, pada tanggal 22 Juli, dilaporkan bahwa sebuah senjata M16 dengan 116 butir amunisi diserahkan kepada PNTL di Aileu.⁹⁰ Dikatakan bahwa senjata ini bukan bekas senjata FALINTIL atau F-FDTL. Penasehat senior kepada Pemerintah Timor Leste mencatat bahwa barangkali senjata ini dibeli di Indonesia untuk kelompok Reinado, yang menunjukkan bahwa barangkali senjata perlu dilacak.⁹¹ Yang membuat penasaran, beberapa imbauan disampaikan kepada para veteran untuk menyerahkan senjata, karena tidak lagi diperlukan. Imbauan tidak langsung kepada para veteran untuk menyerahkan senjata sering diarahkan kepada Elle Sette, yang sekarang adalah Presiden UNDERTIM dan anggota Parlemen. Namun, dia menyatakan bahwa dia telah menyerahkan semua senjata di Aileu pada 2000.⁹²

Kekurangan besar dalam program pengendalian senjata Timor Leste adalah pengelolaan dan

keamanan gudang senjata publik yang resmi. Pemerintah, anggota sektor keamanan (F-FDTL dan PNTL), serta orang sipil pada umumnya betul-betul mengetahui kekurangan yang ada saat ini. Krisis 2006 menggarisbawahi bahwa kebocoran dengan mudah dapat memicu ketidakstabilan. Walaupun Sekretaris Negara untuk Pertahanan telah mengidentifikasi bahwa rehabilitasi gudang senjata F-FDTL adalah prioritas, pembaruan kritis terhadap pengelolaan dan prosedur belum diusulkan.⁹³

Prosedur standar, seperti pendaftaran senjata milik negara, pemeriksaan berkala yang efektif, serta peningkatan hukuman untuk kebocoran, barangkali dapat diperhatikan sebagai prioritas. Tetapi ada cara lain untuk meningkatkan keamanan gudang senjata. Pertama, mekanisme administrasi yang berkaitan dengan pemberian senjata api kepada petugas polisi dan serdadu dan pengambilan kembali harus diperkuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Kedua, pemeriksaan secara berkala yang transparan terhadap gudang senjata dan persediaan senjata adalah sangat penting untuk menjamin perbaikan dalam penguasaan dan pengendalian, dan untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sudah hilang. Ketiga, hukuman untuk tingkah laku yang tidak teliti dan tindak pidana yang sengaja dilakukan dapat memberi insentif yang diperlukan untuk menjamin agar personil keamanan mencegah kebocoran. Tanpa sanksi dan verifikasi, perubahan administrasi macam apa pun tidak akan memberi keamanan yang memadai atas persediaan senjata.⁹⁴

Tabel 2. Senjata yang dikumpulkan sebelum dan setelah Operasi Kilat

Distrik	Senjata Api milik Pemerintah Timor-Leste		Senjata Api buatan sendiri		Senjata Api lain, termasuk senapan angin		Amunisi (butir)		Bom/ granat/ mortir		Senjata Tradisional		Lain-Lain (misalnya sangkur)		Total	
	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008
	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	Sub-total	1 Mei–14 Jul 2008	15 Jul–31 Agu 2008
Aileu	0	0	0	3	0	18	0	8	0	4	0	261	0	0	0	294
Ainaro	0	0	0	2	0	24	0	129	0	0	0	167	0	0	0	322
Baucau	0	0	0	30	0	31	0	2,908	0	4	0	236	0	0	0	3,209
Bobonaro	0	0	0	30	0	145	0	10	0	4	0	636	0	3	0	828
Covalima	0	0	0	3	0	22	0	1,037	0	2	0	383	0	0	0	1,447
Dili	0	0	0	0	0	12	0	2,634	1	10	0	4,271	0	4	1	6,931
Ermera	0	0	1	0	0	0	808	0	2	7	26	55	1	6	838	68
Lautem	0	0	19	25	1	202	98	125	2	2	21	149	0	0	141	503
Liquica	0	0	0	0	0	3	0	372	1	1	0	22	0	10	1	408
Manatuto	0	0	7	8	0	111	130	519	0	7	9	130	6	9	152	784
Manufahi	0	0	0	0	0	50	0	111	0	3	0	607	0	0	0	771
Oecussi	0	1	0	51	0	70	0	131	0	0	0	55	0	125	0	433
Viqueque	0	0	0	0	0	24	0	1,132	0	4	0	958	0	7	0	2,125
Total	0	1	27	152	1	712	1,036	9,116	6	48	56	7,930	7	164	1,133	18,123

Sumber: Operasi UNPol, Misi Terpadu Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste (UNMIT), pada tanggal 2 September 2008.

Kesimpulan

Jenis senjata api kecil dan ketersediaannya memasuki tahap baru di Timor Leste. Walaupun tidak banyak senjata sekarang tersedia, senjata disebarkan antara penduduk sipil dengan cara yang tidak terkendali. Walaupun negara tersebut kecil, jika ketidakpercayaan yang masih membara ditambahkan dengan sejumlah kecil senjata yang tidak terkendali, maka dapat menimbulkan ketidakamanan yang signifikan di Timor Leste. Lagipula, reaksi pemerintah yang kurang bijaksana atas persediaan senjata (tidak sah) yang nyata ataupun diduga dapat mendorong lebih banyak pengadaan formal dan informal. Walaupun rupanya bahwa *Operasi Halibur* dilaksanakan dengan sukses, sektor keamanan tetap dikritik secara berkelanjutan mengenai kapasitas perencanaan dan keabsahannya. Juga tetap berpotensi menjadi jembatan yang akan memungkinkan pemindahan senjata api dari pemilik sah kepada pemilik tidak sah.

Walaupun Laporan Singkat ini telah menggambarkan peranan senjata api kecil dalam tahap-tahap akhir dari sejarah Timor Leste, sejumlah pertanyaan belum terjawab. Misalnya, dinamika pengadaan negara perlu diinvestigasi lebih lanjut. Dengan mengingat kekurangan kronis berkaitan dengan pengelolaan gudang senjata yang tidak teratur, maka belum jelas apakah gudang senjata harus ditambahkan lagi tanpa sistem pengendalian dan verifikasi yang tepat. Pengawasan tepat dari pihak sipil atas pengadaan senjata dapat mencegah pengadaan yang berlebihan dan tidak tepat.⁹⁵ Demikian pula, masih ada keprihatinan atas persediaan amunisi dan perlengkapan: amunisi yang berlimpah-limpah di masyarakat rentan dapat mendorong orang-orang untuk membuat senjata dengan tangan sendiri.

Dalam konteksnya perdebatan saat ini mengenai RUU tentang Senjata Api, penting dicatat bahwa barangkali lebih bijaksana bagi pemerintah untuk memperhatikan persoalan yang berhubungan dengan penghitungan dan pengendalian senjata apinya sendiri sebelum mengusulkan penyebaran senjata ke tangan orang sipil yang 'berwenang'. Pada dasarnya, ada keperluan besar atas perdebatan dalam negeri yang mempertimbangkan keadaan khusus Timor Leste untuk mengendalikan senjata api. Perdebatan ini sangat penting karena masyarakat internasional berencana untuk meninggalkan negara tersebut dalam 12-24 bulan mendatang. Walaupun solusi yang diputuskan oleh Timor Leste tentu saja akan lebih bersinambung daripada solusi internasional, juga akan memerlukan kepemimpinan politik yang mantap dan handal untuk mencegah terulangnya kesalahan sebelumnya.

Catatan

Laporan ini ini didasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan Edward Rees, Penasehat Politik kepada UN Special Envoy, Ian Martin, selama Krisis Timor-Leste pada tahun 2006.

- 1 Bahasa Tetun untuk senjata api.
- 2 Krize: istilah sehari-hari untuk krisis 2006.
- 3 Pada tanggal 23 September 2008 Jaksa Agung memanggil Kol. Lere Annan Timur dan Letkol. Falur Rate Laek untuk hadir di kantornya untuk menjawab pertanyaan tentang tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan krisis 2006 (*Timor Post*, 2008c). Wakil Komisaris PNTL untuk Operasi memberitahu pers bahwa banyak senjata api telah hilang sejak krisis 2006. Namun, sejak 11 Februari 2008 sejumlah senjata api telah dikembalikan, tetapi tujuh senjata Glock 9 mm, satu senjata *shotgun* kaliber 12mm, dan lima senjata HK33 masih hilang (*Timor Post*, 2008d). Mantan Komisaris PNTL, yang sekarang menjadi anggota Parlemen, Paulo Martins, menjawab dengan mengatakan bahwa tidak ada senjata api yang hilang sebagai akibat pengelolannya atas PNTL.
- 4 *Suara Timor Lorosae* (2008b).
- 5 CAVR (2005), Ringkasan Eksekutif, h. 13.
- 6 Durand (2006), h. 56.
- 7 Pemberontakan ini menimbulkan tindakan balasan yang keras oleh orang-orang Portugis. Pada tahun 1912 kira-kira 15,000–25,000 orang Timor Leste telah mati. Sebagai bandingan, 40,000–70,000 orang Timor Leste meninggal selama pendudukan Timor oleh Jepang antara 1942 dan 1945. Selama Perang Dunia Kedua militer Australia memberi senjata api modern kepada kakitangan Timor Leste, dan demikian pula militer Jepang, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil.
- 8 *The weapons were primarily 1886-model Kropatschek (Mauser) 8 mm bolt-action rifles manufactured by Steyr for Portugal* [Sebagian besar senjata api tersebut adalah model 1886 Kropatschek (Mauser) senapan spring kokang 8 mm yang diproduksi Steyr untuk Portugal] (Chamberlain, 2008, h. 48).
- 9 *'... in late 1958, 16 rifles were stolen from the military storehouse in east Dili (13 of which were eventually recovered), and weapons and explosives were being passed to Indonesian vessels from Japanese wartime caches in the Lautem and Viqueque'* [Pada akhir tahun 1958, 16 senapan dicuri dari gudang militer di Dili timur (13 senapan kemudian diperoleh kembali) dan sejumlah senjata api dan bahan peledak diberikan kepada kapal-kapal Indonesia setelah diambil dari persediaan yang disembunyikan Jepang pada masa perang di Lautem dan Viqueque] (Chamberlain, 2008, h. 48).
- 10 FRETILIN (*Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente*); UDT (*União Democrática Timorese*); APODETI (*Associação Popular Democrática Timorese*); KOTA (*Klibur Oan Timor Asuwin*).
- 11 Nichol (2002), h. 303.
- 12 'Pada pukul 1.00 dini hari tanggal 20 Agustus, Rogério Lobato dan Hermenegildo Alves melancarkan pemberontakan bersenjata Fretilin dengan mengambil alih Quartel Geral (markas tentara) di Taibessi. Komisi menerima kesaksian bahwa senjata tersedia dalam jumlah besar di Dili, dan bahwa kedua belah pihak membagikannya dengan sembarangan. Hal ini semakin memperburuk situasi kekerasan' (CAVR, 2005, h. 42).
- 13 CAVR (2005), h. 43–4.
- 14 ABRI telah mulai melakukan operasi pasukan khusus lintas perbatasan pada September 1975, dan bersama pasukan biasa pada bulan Oktober 1975.
- 15 Sebuah laporan dari kedutaan besar Amerika pada bulan April 1976 menjelaskan kesulitan yang dihadapi oleh militer Indonesia: 'Jenderal Yogi (Soepardi, Asisten Perencanaan, Departemen pertahanan)...memperkirakan kekuatan Fretilin sekitar 3000 dengan hanya 5000 dari 15000 pucuk senjata yang sejauh ini disita oleh Indonesia' (CAVR, 2005, h. 74).
- 16 Lebih dari 100 000 orang telah mati (CAVR, 2005, Ringkasan Eksekutif, h. 44).
- 17 Hal ini masih merupakan persoalan sensitif sampai sekarang, dan banyak orang berpikir bahwa *rendidos* (orang-orang yang menyerahkan diri) tidak bertahan sebagaimana tepat, dan orang-orang yang menyerahkan diri dengan begitu banyak senjata tetap dianggap negatif oleh sebagian orang sampai saat ini.
- 18 Gusmão (2000), h. 62.
- 19 Misalnya, pada tanggal 8 Agustus 1983, selama penyerangan Kraras di Viqueque, FALINTIL mengambil 17 senapan SP1. Pada tanggal 21 November 1986, 34 senapan M16 diambil dari ABRI di Iliomar (email dari Ernie Chamberlain, 6 Agustus 2008).
- 20 Tindakan besar terakhir oleh FALINTIL terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah penyerangan pada tahun 1998 terhadap pos TNI di Alas, Manufahi. Penyerangan ini dilakukan setelah melawan perintah, dan diadakan oleh Komandan Elle Sette dan dipimpin oleh Amaro 'Susar' da Costa, dan sejumlah anggota TNI mati dan sejumlah senjata api diambil. Pihak TNI melakukan retaliasi berat.
- 21 Salah satu penyerangan semacam ini direkam dalam film *Blockade*. Film ini memperlihatkan penyerangan atas konvoi ABRI di Baucau pada tanggal 20 Agustus 1996 yang dipimpin oleh David 'Alex' Daitula, sambil Taur Matan Ruak berkuasa secara keseluruhan. Ini cukup signifikan karena setelah penyerangan itu, walaupun setidaknya tidaknya satu orang laki-laki akan meninggal akibat lukanya, komandan dengan senang mengatakan bahwa tindakan ini 'berhasil' karena telah mengambil 'satu senapan dan beberapa butir amunisi'.
- 22 Senjata api dibeli dari personil keamanan Indonesia, dan seringkali dibeli dari orang asal Timor Leste dalam ABRI/TNI-Polisi Nasional Indonesia (POLRI). Seorang mantan anggota FALINTIL mengatakan bahwa pada tahun 1997 sebuah pistol dapat dibeli dengan harga Rp. 500,000–1,200,000, sebuah AK-47 berharga Rp. 1,500,000–2,000,000, dan sebuah M16 berharga Rp. 2,500,000–3,500,000 (wawancara dengan mantan anggota FALINTIL, Dili, 27 Agustus 2008). Senjata api dibeli dari personil keamanan Indonesia, dan sering dibeli dari orang asal Timor Leste dalam ABRI/TNI-POLRI.
- 23 Seorang mantan anggota FALINTIL mengatakan bahwa sejumlah kecil senapan submesin Uzi diambil dari agen-agen intel SGI yang telah ditangkap atau dikepung (SGI = SATGAS-INT), Satuan Grup Intelijen Pasukan Khusus Indonesia (wawancara dengan seorang mantan anggota FALINTIL, Dili, 27 Agustus 2008).
- 24 Dalam kecacauan umum yang berkaitan dengan jajak pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999, sejumlah milisi Indonesia dan milisi pro-otonomi dilucuti senjatanya oleh unsur-unsur pro-kemerdekaan, yang menyebarkan lebih banyak senjata milisi antara penduduk umum. Dalam satu kasus, sebuah kelompok pro-kemerdekaan mencegah sebuah konvoi yang memindahkan pengungsi di Laileia, dimana sebuah truk yang dijaga oleh POLRI dihancurkan. Dua puluh senjata api milik POLRI diambil.
- 25 Misalnya, kelompok milisi utama di distrik Bobonaro, Halilintar, didirikan dengan dukungan Indonesia pada tahun 1975 dan membantu dalam invasi.
- 26 KKP (2008), h. 256.
- 27 Jenisnya termasuk senapan keluaran militer modern (M16, Mauser, SKS, Ranger, RPD, SP2, SP1, AR16, G3, pistol, dan granat) dan senjata api buatan sendiri (*rakitan*) dan senjata tajam (KKP, 2008, h. 195).
- 28 KKP (2008), h. 108.
- 29 Robinson (2003), h. 109.
- 30 *Ibid*, h. 109.
- 31 HRW, Indonesia (2002), h. 30.

- 32 Antara Mei 2001 dan Desember 2002 TNI mengambil 824 senjata GAM di Aceh: 498 senjata standar dan 326 *rakitan* (biasanya *bom rakitan*).
- 33 KKP (2008), h. 197.
- 34 Dalam satu kasu, seorang petugas gudang senjata TNI menyerahkan 36 senjata *rakitan* kepada seorang pemimpin milisi (KKP, 2008, h. 193).
- 35 Polisi PBB, Misi Terpadu Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste, *Operasi Kilat*, 2 September 2008.
- 36 Lihat, misalnya, Peake (2008).
- 37 Misalnya, Komandan Elle Sette (L7) meninggalkan daerah terbatas dengan sejumlah anggotanya. Seorang petugas senior dalam militer PBB pada saat itu mencatat bahwa 'Elle Sette dan kira-kira 20 anggotanya memutuskan untuk meninggalkan Aileu setelah percekocokan dengan TMR dan komandan-komandan lain. Mereka tentu saja membawa beberapa senjata, tetapi tidak banyak' (korespondensi email dengan mantan komandan pasukan UNTAET, 17 Juli 2008).
- 38 Sekurang-kurangnya 35 senjata tersebut digunakan pada 2006.
- 39 Senjata tersebut kemudian diganti oleh senjata M16A2.
- 40 'Barangkali pada saat ini ada 60–120 anggota milisi dalam sekurang-kurangnya delapan kelompok yang terletak dalam TL dan 80–130 anggota milisi lainnya yang telah diberi perlengkapan dan siap sedia di NTT untuk melakukan operasi ke dalam TL (UNTAET PKF HQ, 2000). Satu senjata M16, satu senjata SKS, 400 butir amunisi, dan sejumlah granat dikumpulkan.
- 41 'Banyak senjata, amunisi dan granat masih berada di tangan milisi. Ketika penggeledahan dilakukan di kamp-kamp, mereka menyembunyikan senjata-senjata tersebut di luar kamp dengan menguburkannya dalam tanah' (laporan oleh NGO-NGO Timor Barat kepada Delegasi PBB, *Humanitarian NGO Forum of West Timor*, Kupang, 14 November 2000).
- 42 Misalnya, pada tanggal 4 Januari 2003 sebuah kelompok yang terdiri dari 20–30 orang yang bersenjata otomatis meluncurkan penyerangan terhadap Atsabe, dan lima orang mati (UNSC, 2003).
- 43 Amnesty International dan Program Pemantauan Pelayanan Yudisial yang berbasis di Dili.
- 44 Dua orang mati, sedangkan lima orang dilukai.
- 45 UNPKF tembak-menembak dengan 8–9 orang laki-laki, satu orang tertembak mati (UNSC, 2003).
- 46 UNSC (2003).
- 47 UNPKF (2004).
- 48 Yang paling serius adalah penyerangan terhadap kantor polisi Baucau pada tanggal 28 November 2002 dan kerusakan Dili pada tanggal 4 Desember 2002 yang menimbulkan kematian beberapa orang.
- 49 Rogerio Lobato baru-baru ini kembali dari pembuangan, yang mana sebagian waktu dihabiskan dalam penjara Afrika karena menyelundupkan intan, dan Rogerio Lobato menggunakan sebagian kelompok ini untuk melemahkan keabsahan F-FDTL. Dia ditunjuk sebagai menteri dalam negeri, dengan tanggungjawab atas PNTL pada tanggal 20 Mei 2002.
- 50 CA-75, Sagrada Familia, CPD-RDL, OPS, Isolados.
- 51 Ie KORKA, PSHT, dan 77.
- 52 Colimau 2000 dan Bua Malus adalah dua contoh saja.
- 53 Dengan mengingat bahwa PNTL lebih berbasis di komunitas dan mempunyai rantai komando yang lebih lemah serta identitas kelembagaannya, maka keadaan ini lebih sering melibatkan polisi daripada F-FDTL.
- 54 Pada tanggal 12 Maret 2005 sekelompok lima orang yang bersenjata M16 dan pistol Glock mencoba merampok Bank ANZ di Dili (UNOTIL, 2005).
- 55 Persaudaraan Setia Hati Terate.
- 56 'Orang terasing' termasuk Daniel Mota, Vicente 'Karau Timor', Joaquim 'Tim Saka', Cipiriano 'Nunura', dan Loro Dias.
- 57 Surat dari Presiden Xanana Gusmão, 10 September 2003.
- 58 *Unidade de Reserva da Polícia* (URP); *Unidade Patrulhamento Fronteira* (UPF); *Unidade Intervenção Rápida* (UIR).
- 59 Sancar Pty, terdaftar di Departemen Perdagangan pada 2003, No. 13229. Yang menarik, logo FN Herstal, produsen Belgia yang membuat FNC dan F2000, diperlihatkan dalam website Sancar, <http://www.sc-et.com> (diakses pada 11 dan 28 Agustus 2008). Juga dilaporkan bahwa Sancar memberi 129 senapan mesin ringan yang dapat dibawa untuk F-FDTL (MacDonald, 2006).
- 60 Berhubungan dengan senjata F2000, pemilik perusahaan itu berkomentar kepada *Sydney Morning Herald* pada 2006 bahwa 'ini yang diperlukan kalau mau menjadi tentara yang efektif' (MacDonald, 2006).
- 61 Pendaftaran perusahaan Cavalho Bravo mengindikasikan bahwa perusahaan ini terdaftar untuk mengimpor dan menyediakan peralatan militer/polisi, amunisi, granat, helikopter, kendaraan lapis baja, dan kapal patroli (Sekratriis Negara untuk Perdagangan dan Industri, pendaftaran perusahaan No. 10368, 22 Maret 2005).
- 62 Cavalho Bravo juga membeli 215,000 5.56 mm ball, 20,000 5.56 mm ball tracer, 120,400 5.56 mm 4-ball tracer link (M16A2), dan 3,000 granat serpihan dan berbagai macam material lainnya untuk F-FDTL pada 2003, dengan biaya USD 462 727.62; lihat kwitansi pembelian ETPA 3086 24/12/2002. Granat tersebut dibeli dari Korea Selatan lewat Surabaya Indonesia.
- 63 *Timor Post* (2004).
- 64 Undang-Undang Organik Kepolisian Nasional Timor-Leste, Undang-Undang No. 8/2004, 5 Mei 2004.
- 65 *Companha Country Supply II*, pendaftaran perusahaan Departemen Perdagangan No. 13179, menyediakan 'peralatan militer, senjata dan senjata api' hanya berdasarkan pesanan.
- 66 OHCHR (2006), h. 26.
- 67 TLAVA telah memperoleh catatan dari Departemen Logistik PNTL yang menunjukkan bahwa antara tanggal 15 April dan 24 Mei 2006, 11 petugas PNTL yang berpangkat inspektur dan sub-inspektur menyetujui pengeluaran 49,600 butir amunisi yang berkaliber 5.56 mm, dan pada tanggal 25 Mei 2006 tiga petugas senior menyetujui pengeluaran 10,500 butir amunisi, sehingga mencapai total 60,100 butir amunisi yang dikeluarkan. Para petugas tersebut berasal dari sejumlah unit, termasuk UPF, CSP, NID, Distrik Dili, Distrik Liquica, Kantor Komisaris, dan Bagian Operasi. Selain itu, pada Januari 2008 TLAVA mengetahui bahwa PNTL dan UNPol mengambil 1000 butir amunisi berkaliber 5.56 dari rumah seorang sipil di daerah Comoro. Seorang responden mengatakan bahwa dia melihat banyak senjata rakitan yang dirancang untuk menggunakan amunisi berkaliber 5.56 dan sering kali menyita granat. Responden tersebut juga mengatakan bahwa, menurut laporan, 19 senjata semi-otomatis merek Steyr diambil dari rumah seorang pemimpin gerombolan di Manlueauna pada Januari 2008, yang kemungkinan besar berkaitan dengan PNTL: Anthony Henman, Wakil Komandan Kantor Polisi UNPol di Comoro, Dili, 7 Agustus 2008.
- 68 OHCHR (2006), h. 39, 40.
- 69 IWAT termasuk wakil dari Australia, Malaysia, Selandia Baru, Portugal, Timor-Leste, PBB, dan AS.
- 70 IWAT (2006b).
- 71 Walaupun demikian, pemimpin PSHT, Jaime Lopes, ditangkap bersama puluhan anggotanya pada tanggal 30 Januari 2007, dalam penggerebekan terpadu oleh pasukan FPU, ISF, dan UNPol. Sejumlah besar senjata disita dalam penggerebekan, termasuk senjata api, amunisi dan bom molotov (Scamary, 2007).
- 72 Pada akhir 2007 UNMIT melakukan peninjauan tentang kepemilikan senjata tidak sah di distrik-distrik bagian timur dan menemukan bahwa ada sejumlah kecil senjata, yang diduga sebagai senjata HK33, tetapi mungkin informasi ini tidak akurat, yang berada di tangan orang sipil di daerah tersebut, yang menurut laporan senjata tersebut dibagi selama krisis 2006.
- 73 Komando Operasi Bersama.
- 74 Operasi Pengumpulan.
- 75 Sebagaimana diumumkan di televisi nasional oleh komandan operasi KOK, Mayor Coliate, TVTL, 29 April 2008, dengan memperlihatkan senjata dan amunisi (video dan foto disimpan dalam arsip oleh penulis laporan).
- 76 *Jurnal Defeza Nasional* (2008), h. 5.
- 77 Diskusi dengan petugas F-FDTL dan PNTL yang berhubungan dengan *Operasi Halibur*.
- 78 Undang-undang ini yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dapat dilihat di <http://www.eastimorlawjournal.org/East_Timor_National_Parliament_Laws/draft_arms_law.html>.
- 79 Lihat, misalnya, Parker (2008).
- 80 Seorang anggota dari Dewan Menteri memberitahu TLAVA bahwa dia belum pernah membaca undang-undang ini, karena hanya disediakan dalam bahasa Portugis.
- 81 Baik Pimpinan F-FDTL maupun Pimpinan PNTL menyampaikan keprihatinan tentang undang-undang ini.
- 82 *Timor Post* (2008a).
- 83 *Jurnal Nasional DIARIO*, (2008).
- 84 Ibid.
- 85 Ibid.
- 86 TVTL (2008). Ini termasuk peluru, granat dan senapan.
- 87 Walaupun seorang petugas intelijens asal Timor Leste yang diwawancarai pada tanggal 16 September menyarankan bahwa ini adalah senjata G3 dari masa Portugal, sedangkan pada tanggal 22 September 2008 seorang anggota Unit Hak Asasi Manusia UNMIT menyarankan bahwa senjata ini adalah pistol dari musim.
- 88 UNMIT (2007).
- 89 RTL (2008). Caixa Clandestina Larigua, Suco Buibua, Baucau menyerahkan 600 peluru untuk senjata SKS, Mouser, dan M16, yang menurut laporan diambil dari persediaan tersembunyi dari kelompok perlawanan.
- 90 *Jurnal Nasional DIARIO*, 28 Juli 2008.
- 91 Pembicaraan pribadi dengan penasihat senior kepada pemerintah, Agustus 2008.
- 92 *Suara Timor Lorosae* (2008a). Presiden FRETILIN, Lu Olo, mengimbau kepada semua veteran yang masih memegang senjata untuk menyerahkannya kepada otoritas yang relevan selama *Operasi Kilat*.
- 93 Pada tanggal 20 dan 22 September 2008 para petugas PNTL CSP dilihat membawa senapan M16 di Dili, yang bukan senjata api keluaran PNTL.
- 94 Memang, pada tanggal 18 September 2008, Jose Luis Oliviera, Direktur *HAK Foundation*, sebuah NGO hak asasi manusia terkemuka, mengkritik jaksa agung karena tidak serius untuk menuntut kejahatan yang berkaitan dengan senjata; lihat *Timor Post* (2008e).
- 95 Sebagai hal yang positif, dan perubahan drastis dari administrasi sebelumnya, Sekretaris Negara untuk Pertahanan dua tahun sekali menerbitkan *Jurnal Defeza Nasional* dengan maksud untuk meningkatkan transparansi tentang rencana F-FDTL. Pada 2008 dua edisi diterbitkan (*Jurnal Defeza Nasional*, 2008a; 2008b). Terbitan tersebut memperhatikan persoalan seperti gudang senjata, pengadaan senjata dan amunisi, kebijakan dan operasi.

Daftar Pustaka

- CAVR (Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi). 2005. Laporan *Chega!*. Dili: CAVR.
- Chamberlain, Ernest. 2008. *Faltering Steps: Independence Movements in East Timor: 1940s to the Early 1970s*. Self published. Agustus.
- Cohen, David. 2003. *Intended to Fail: The Trials before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*. Edited by the International Center for Transitional Justice. Berkley: Berkeley War Crimes Studies Center.

- and Leigh-Ashley Lipscomb. 2007. *Seeking Truth and Responsibility, Part II: Addendum to Report of the Expert Advisor to the CTF*. Berkeley: Berkeley War Crimes Studies Center. October.
- Cohen, David, Leigh-Ashley Lipscomb, and Asmara Nababan. 2007. *Seeking Truth and Responsibility: Report of the Expert Advisor to the CTF*. Berkeley: Berkeley War Crimes Studies Center. October.
- KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan). 2008. *Laporan akhir dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia–Timor-Leste*. Dili: CTF.
- Della-Giacoma, Jim. 1995. 'Timorese Rebel Displayed as Youth Group Launched.' Reuters News, 19 Juli.
- Durand, Frederic. 2006. *East Timor: A Country at the Crossroads of Asia and the Pacific: A Geo-historical Atlas*. Bangkok: Silkworm Books.
- Gusmão, Xanana. 2000. *To Resist Is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão with Selected Speeches and Writings*. Ed. Sarah Niner. Melbourne: Aurora/David Lovell Press.
- Herman, Justin. 1999. 'Pola Hit and Run Jadi Andalan Falintil' (Falintil tactics rely on hit and run). *Jawa Pos* (Surabaya), 13 April.
- HRW (Human Rights Watch), Indonesia. 2002. 'Breakdown: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi.' *Human Rights Watch, Indonesia*, Vol. 14, No. 9 (C). December.
- IWAT (International Weapons Audit Team). 2006a. *F-FDTL Weapons Stocks*. Dili: IWAT. June.
- . 2006b. *PNTL Weapons Stocks*. Dili: IWAT. September.
- Jurnal Defeza Nasional*. 2008. 'Forca Ki'ik ba Nasaun Ki'ik.' No. 1. January–Juli.
- . 2008b. 'Halibur.' No. 2. Juli–December.
- Jurnal Nasional DIARIO*. 2008a. 'Bishop Basilio: Not yet the Time to Give Civilians the Right to Own Guns.' 7 Juli.
- . 2008b. 'Fernando La Sama: Lei Kilat Important PN Debate Hafoin Resesu.' 22 Agustus.
- MacDonald, Hamish. 2006. 'Timor Minister Equipped Police as Private Army.' *Sydney Morning Herald*, 19 June.
- Muggah, Robert, ed. 2008. *Security and Post-Conflict Reconstruction: Dealing with Fighters in the Aftermath of War*. New York: Routledge.
- Nichol, Bill. 2002. *Timor: A Nation Reborn*. Jakarta: Equinox.
- OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights). 2006. *Report of the United Nations Independent Special Commission of Inquiry for Timor-Leste*. Geneva: OHCHR. 2 October.
- Parker, Sarah. 2008. 'Commentary on Draft Arms Law in Timor-Leste.' *East Timor Law Journal*. <<http://www.timor-leste-violence.org>>
- Peake, Gordon. 2008. 'What the Timorese Veterans Say: Unpacking DDR in Timor-Leste.' In Robert Muggah, ed.
- Robinson, Geoffrey. 2001. 'People's War: Militias in East Timor and Indonesia.' *South East Asia Research*, Vol. 9, No. 3. November.
- . 2003. *East Timor 1999: Crimes against Humanity*. Report commissioned by the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). University of California Los Angeles. Unpublished. <<http://www.ictj.org>>
- RTL. 2008. 'Baucau Hands over Bullets.' 11 Agustus.
- Scambray, James. 2007. *Disaffected Groups and Social Movements in East Timor*. AusAID-commissioned report. 12 January. Unpublished.
- Suara Timor Lorosae*. 2008a. 'Lu Olo Apela Veteranus Entrega Kilat: FRETILIN La Rai Kilat.' 25 Agustus.
- . 2008b. 'Konaba Krizi 2006: Tribunal Notifika Lere ho Falur Sai Arguido.' 24 September.
- Timor Post*. 2004. 'Xanana: NGO Labele Kritika Sosa Kilat.' 25 Agustus.
- . 2008a. 'PR Kontra Lei Ema Civil Kaer Kilat.' 26 June.
- . 2008b. 'Kilat Boot PNTL 5, Pistola 17 Se Lakon.' 7 Agustus.
- . 2008c. 'Mateus: Kilat Automatika 13 PNTL Ladauk Tama.' 17 September.
- . 2008d. 'Paulo Rejeita Kilat PNTL Lakon Iha Krize 2006.' 18 September.
- . 2008e. 'PGR Mete Demais Politika, Kilat Balun Seidauk Entrega.' 20 September.
- TVTL. 2008. 'Illegal Weapons Handed over to PNTL in Viqueque.' 15 Agustus.
- UNMIT (United Nations Integrated Mission in Timor-Leste). 2007. *Weekly Situation Report*. 22–27 April.
- UNOTIL (UN Office in Timor-Leste). 2005. 'Interior Minister Lobato Did Not Delay in Giving Some Policy Direction on How the Investigation Should Be Conducted.' *UNOTIL Political Affairs, Human Rights and Legal Weekly Report*. 8–14 March.
- UNPKF (UN Peacekeeping Force). 2004. *Military Information Info Report 041/04*. 25 February.
- UNSC (United Nations Security Council). 2003. *Special Report of the Secretary General on the United Nations Mission of Support in East Timor*. S/2003/243 of 3 March.
- UNTAET PKF (United Nations Transitional Administration in East Timor, Peacekeeping Force). 2001. *Militia Handbook*. Dili: UNTAET. 5 April.
- HQ. 2000. *Military Information Cell*. SUPINFOREP 005/00. 14 Agustus.
- Victorino, José Domingos Bruno (adviser to the Ministry of the Interior; Lt. Col., GNR). 2007. *POLÍCIA NACIONAL DE TIMOR-LESTE (PNTL): An Assessment and Proposal for Restructuring*. November.

Terbitan TLAVA

Makalah

- Parker, Sarah. 2008. 'Commentary on the Draft Arms Law in Timor-Leste.' *East Timor Law Journal*. Available online in English, Tetum, Indonesian, and Portuguese. <<http://www.easttimorlawjournal.org/Articles/Index.html>>

Ringkasan Proyek TLAVA

Penilaian Kekerasan Bersenjata Timor-Leste (TLAVA) adalah proyek penelitian independen yang dikelola oleh Austcare dan Penelitian Senjata Api Kecil. Proyek ini melibatkan mitra publik dan mitra non-pemerintah dan dirancang untuk mengidentifikasi dan membahas berbagai perspektif tentang bagaimana dapat mencegah dan mengurangi kekerasan bersenjata yang nyata serta dan yang diduga akan terjadi di Timor Leste. Dengan dukungan dari jaringan mitra, proyek ini berbasis di Dili dan akan menjadi sumber data internasional dan domestik tentang kecenderungan kekerasan. Antara 2008 dan 2010, TLAVA akan menjadi pusat untuk penukaran dan pembagian informasi dan analisa dengan fokus spesifik pada:

- Faktor resiko, dampak dan kerugian socio-ekonomi dari kekerasan bersenjata berhubungan dengan kesehatan penduduk —pada khususnya perempuan, anak dan pemuda, serta pengungsi dalam negeri;
- Dinamika kekerasan bersenjata yang berkaitan dengan kelompok 'resiko tinggi' seperti gerombolan, komunitas khusus di distrik-distrik yang terkena dampak, para pemohon petisi, lembaga negara dan hal-hal yang dapat memicu kekerasan seperti pemilihan; dan
- Ketersediaan dan penyalahgunaan senjata api (misalnya senjata tajam, senjata buatan sendiri, atau yang dibuat oleh 'tukang') sebagai faktor yang mendukung kekerasan bersenjata dan ketidakamanan yang konstan.

Tujuan dari proyek ini adalah memberi opsi untuk merancang kebijakan yang didasarkan bukti sah kepada pemerintah Timor Leste, masyarakat sipil serta mitra-mitranya untuk mengurangi kekerasan bersenjata. Proyek ini menggabungkan berbagai metoda – pengamatan atas kesehatan publik dan penelitian yang didasarkan kelompok fokus dan wawancara – untuk mengidentifikasi prioritas tepat dan strategi praktis. Hasil temuan akan diterbitkan dalam Tetum, Bahasa, Portugis dan Inggris. Laporan Singkat TLAVA memberi laporan pada tepat waktu tentang aspek penting dari kekerasan bersenjata di Timor Leste, termasuk ketersediaan dan pendistribusian senjata api kecil dan senjata buatan sendiri di Timor-Leste serta kekerasan yang berkaitan dengan pemilihan.



Proyek ini didukung oleh AusAID.

Pengucapan Terima Kasih

Desain dan susunan: Go Media Design

Keredaksian: Emile LeBrun, Robert Muggah dan James Turton

Kontak

Untuk informasi lebih lanjut, lihat

www.timor-leste-violence.org

atau hubungi

info@timor-leste-violence.org.

